

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUNAAN BARANG YANG MEMAKAI MEREK TIRUAN (TINJAUAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA)

Oleh:

MELTALIA PANJAITAN, S.H.
NIM. A.21211017

ABSTRAK

Penelitian tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)” bertujuan untuk mengetahui Budaya Hukum Masyarakat Yang Menggunakan Barang Merek Tiruan Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Untuk mengetahui Pengaturan Terhadap Masyarakat Yang Menggunakan Barang Yang Memakai Merek Tiruan dan Untuk menggambarkan bagaimana Seharusnya Pengaturan Terkait Dengan Fenomena Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan Oleh Masyarakat Guna Menunjang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (*Socio Legal Approach*). Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena budaya hukum masyarakat dalam menggunakan barang merek tiruan. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder Pelaksanaan analisis data yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan penggunaan metode induksi. Metode induksi adalah proses penalaran dimana temuan-temuan dalam bentuk data dan informasi dari alam inderawi yang kongkrit dipakai untuk membangun teori sehingga teori yang dibangun tersebut dapat dikualifikasikan sebagai teori yang membumi.

Bahwa budaya hukum masyarakat yang menggunakan merek-merek palsu yang diproduksi oleh pelaku usaha selama ini telah menjadi suatu trend, namun kenyataan menunjukkan budaya tersebut sangat bertentangan dengan budaya hukum yang baik, sebab budaya hukum yang baik meliputi sikap, nilai dan perilaku masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak pernah mengatur atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang menggunakan produk-produk hasil dari pemalsuan merek-merek terkenal, hal ini menyebabkan budaya hukum masyarakat menjadi tidak baik karena tidak adanya aturan yang tegas, dianggap oleh masyarakat perbuatan menggunakan merek-merek palsu bukanlah suatu

kesalahan. Bahwa pengaturan berkaitan dengan merek tidak saja diatur dalam undang-undang nasional Indonesia melainkan juga diatur dalam suatu aturan Internasional, hal ini menunjukkan betapa berharganya sebuah kekayaan intelektual untuk dihargai dan dilindungi, namun pengaturan yang ada selama ini belum memberikan perlindungan secara maksimal karena tidak terdapat aturan tentang sanksi bagi pengguna merek-merek palsu, sehingga dimungkinkan perbaikan terhadap peraturan yang telah ada selama ini.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Merek Barang, Budaya Hukum

ABSTRACT

Thesis with the title: "Analysis of Judicial Law Enforcement Against Use of goods whose Using Artificial Brand (Overview Of Legal Culture Society Aspects Users)" aims to determine Culture Law Society That Uses Counterfeit Trademark Goods Seen From Trademark Law No. 15 of 2001, To Settings know Communities Against Using Counterfeit goods whose Wear Brand and To illustrate how Supposedly Related Settings With the phenomenon of goods subject to the Use of Artificial Wear Brand To Support for Community Law Enforcement Against Trademark Infringement.

Is done by using sociological juridical approach (Socio-Legal Approach). Sociological approach used to describe the data that is found in the field of public law cultural phenomenon in the use of vehicles on the highway. Normative juridical approach that is by researching library materials or secondary data Implementation of data analysis by the author is more focused use of the method of induction. Induction method is a process of reasoning in which the findings in the form of data and information from the natural sensory concrete used to build the theory that the theory is built can be qualified as grounded theory.

Legal culture of society who use counterfeit brands are produced by businesses during this time has become a trend, but reality shows that culture is contrary to good legal culture, for good legal culture includes attitudes, values and behavior of the people to obey and compliance with applicable law. That Law No. 15 of 2001 on Marks never regulate or impose sanctions on people who use the products result from counterfeit famous brands, this causes legal culture of society are not good because of the absence of strict rules, considered by society actions using fake brands is not an error. That the arrangements relating to the brand not only regulated in national legislation Indonesia but also regulated in an international protocol, this shows how valuable an intellectual property to be respected and protected, but the existing arrangement has not provide maximum

protection because there are no rules about sanctions for users of counterfeit brands, so it is possible improvements to the existing regulations for this.

Keywords: Law Enforcement, Brand Goods, Culture Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industrialisasi di berbagai bidang produksi saat ini tidak diikuti dengan penghargaan akan hak kekayaan intelektual. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (*brand image*). Mereka tidak perlu repot repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu *up to date*, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya “bandar” yang siap untuk menerima produk jiplak tersebut.

Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta lapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi. Ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Salah satunya adalah dengan membeli barang-barang bermerek. Barang-barang dengan

merek tersebut tentunya selalu dibandrol dengan harga yang tinggi. Akhirnya, masyarakat seringkali mengambil jalan pintas dengan membeli versi palsu dari merek tersebut agar tetap terlihat bergaya.³¹

Produk-produk bermerek (*luxrury good*) asli tapi palsu (aspal) seperti hanphone, baju, celana, jaket dan berbagai asesoris lainnya sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar, peredarannyapun meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang sangat murah. Peredaran barang-barang aspal tersebut diiringi pula dengan pemanfaatan barang tersebut oleh konsumen. Konsumen yang mengedepankan gaya hidup tidak pernah memandang barang yang digunakan asli atau palsu tetapi yang dilihat adalah barang dengan merek yang sama dan harganya terjangkau.³²

Memalsukan merek juga dinilai melanggar hak asasi pencipta. Karena dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 27 berbunyi bahwa, *“everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”*— Semua orang berhak mendapatkan hak proteksi moral dan material bagi hasil dari yang mereka ciptakan, karena mereka adalah penciptanya.”

Negara Indonesia mengatur tentang merek pada undang-undang khusus. Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang "**KW**" atau barang tiruan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

³¹ Nadira Ma'rifa, Artikel : *Kenapa Memakai Barang KW Itu Kesalahan Terbesar Fashion ?*, Diposting 31 Juli 2014, diunggah tanggal 10 Februari 2015 www.google.com

³² *Ibid*,

Merek khususnya dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Pasal 94 diatur mengenai tindak pidana terkait merek :

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Indonesia sendiri, kasus perdagangan barang bajakan dan merek palsu juga marak. Bahkan, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan pelanggaran hak cipta terburuk oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Tas dengan merek palsu pun dengan mudah bisa masuk ke dalam pusat perbelanjaan besar. Di Jakarta, pusat perdagangan merek palsu berada di Mangga Dua dan Glodok.³³

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas Merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang melakukan pemboncengan atas ketenaran pihak

³³ Pemerintah DKI mulai mengambil tindakan untuk masalah ini. Tahun 2013 ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau mengeluarkan Dekrit Gubernur untuk memberi peringatan kepada setiap pusat perbelanjaan agar menghormati hak kekayaan intelektual dengan tidak dengan tidak mengijinkan *vendor* mereka memperdagangkan barang bajakan. Lihat. Artikel : Bagaimana Perdagangan Merek Palsu di Indonesia? Tas Merek Palsu via ethicsalarms.files.wordpress.com, diunduh tanggal 20 Mei 2015 jam 13.00 wib

lain³⁴, karena Merek yang sudah dikenal masyarakat cepat laku dipasaran sehingga akan mendatangkan keuntungan relatif besar dalam waktu yang relatif cepat. Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum.³⁵ Perbuatan menggunakan Merek atau tanda semacam itu termasuk persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Dalam TRIPs (*Trade Related Intellectual Properties*) disebutkan, bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagai korban peniruan merek. Misalnya dalam kasus Nike di Indonesia, Mahkamah Agung RI berpendapat, bahwa menggunakan merek terkenal di dunia internasional tanpa izin dapat juga mengelabui konsumen, seolah-olah barang yang dipalsukan mereknya tersebut barang asli, padahal barang tiruan tersebut mungkin mutunya lebih rendah dari barang aslinya.

Selain itu, pada peraturan yang tercantum dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) mensyaratkan pencantuman indikator atas asal barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Pemalsuan atas merek menjadi kendala perdagangan maupun investasi, dengan demikian Penegakan hukum merek merupakan sebuah komitmen yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO.

Hak Merek merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang fair. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 218

³⁵ A. Sonny Keraf, 1993, *Etika Bisnis – Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 69.

jasa, dan juga untuk membedakan barang atau jasa sejenis dari produksi satu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya, agar perilaku bisnis tidak merugikan konsumen serta ketentuan-ketentuan tentang perlindungan konsumen dapat ditaati oleh pihak-pihak terkait.

Penggunaan merek-merek palsu ini tidak terlepas dari pengguna atau konsumen yang menjadi target market penjualan. Jumlah pengguna merek-merek palsu ini semakin menjamur seiring dengan trend mode yang melanda masyarakat. Hal ini berkaitan dengan budaya hukum masyarakat pengguna merek-merek palsu yang tidak pernah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang salah. Tidak adanya pengaturan tentang pengguna merek-merek palsu menyebabkan masyarakat merasa tidak pernah salah untuk menggunakan produk-produk dari merek-merek yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan hukum didalam masyarakat. Didalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Didalam budaya hukum dan pemerintahan masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi nilai hukum dan

pemerintah sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BARANG YANG MEMAKAI MEREK TIRUAN (TINJAUAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Budaya Hukum Masyarakat Yang Menggunakan Barang Merek Tiruan Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ?
2. Bagaimana Pengaturan Terhadap Masyarakat Yang Menggunakan Barang Yang Memakai Merek Tiruan ?
3. Bagaimanakah Seharusnya Pengaturan Terkait Dengan Fenomena Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan Oleh Masyarakat Guna Menunjang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek ?

³⁶ Rahmat Yudhi Septian, Artikel : *Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Pemerintah*, diposting Juni 17, 2013 by yuddhiearrochman11, www.google.com. Diunduh tanggal. 12 Mei 2015 jam 12.00 wib

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Budaya Hukum Masyarakat Yang Menggunakan Barang Merek Tiruan Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui Pengaturan Terhadap Masyarakat Yang Menggunakan Barang Yang Memakai Merek Tiruan.
3. Untuk menggambarkan bagaimana Seharusnya Pengaturan Terkait Dengan Fenomena Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan Oleh Masyarakat Guna Menunjang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya pada pengembangan hukum bisnis, dalam hal hukum Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan perlindungan hak merek yang dimiliki oleh seseorang.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta masukan bagi para pelaku bisnis serta pengambil kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual serta meningkatkan budaya hukum yang baik bagi masyarakat untuk menghargai karya orang lain.

E. Kerangka Teoritik

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 yang berbunyi :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁷

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the*

³⁷ Jimly Asshiddiqie, Artikel : *Penegakan Hukum*.<http://www.docudesk.com>. diunggah tanggal 27 Februari 2015, hlm. 1

³⁸ Ibid, hlm. 1

rule of law’ versus *‘the rule of just law’* atau dalam istilah *‘the rule of law and not of man’* versus istilah *‘the rule by law’* yang berarti *‘the rule of man by law’*. Dalam istilah *‘the rule of law’* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *‘the rule of just law’*. Dalam istilah *‘the rule of law and not of man’* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *‘the rule by law’* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.³⁹

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakan hukum tidak dapat berjalan tanpa adanya kesadaran hukum, **kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Menurut Lemaire⁴⁰ kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum**

³⁹ Ibid, hlm. 1

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, Artikel : *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Diposting : Kamis 20 Maret 2008, diunggah tanggal 27 Februari 2015

hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Hal ini masih memerlukan kritik. Perlu kiranya diketahui bahwa Krabbe dan juga Kranenburg termasuk mereka yang mengembangkan teori tentang kesadaran hukum.⁴¹

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan (Scholten) . Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto⁴³, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu,

⁴¹ Ibid, hlm. 1

⁴² Ibid, hlm. 1

⁴³ Ibid, hlm. 2

misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan keempat indikator menurut Soerjono Soekanto, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Akan tetapi, kalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

Hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tertentu, tetapi merupakan perangkat tradisi, objek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya, karena hukum harus dilihat dari suatu sistem yang utuh. Bahwa suatu sistem itu meliputi : (1) suatu sistem itu selalu berorientasi pada tujuan, (2) keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya, (3) sistem itu selalu berorientasi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya, dan (4) bekerjanya bagian-bagian dari suatu sistem menciptakan sesuatu yang berharga.⁴⁴

Di pihak lain, dalam pergaulan hidup manusia menginginkan keadaan tenteram, damai, dan teratur dalam masyarakat. Dengan suasana yang demikian mereka berharap dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingannya dengan baik.

⁴⁴Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 79

Oleh karena itu baik secara sadar atau tidak, manusia dalam hidup bermasyarakat memerlukan adanya suatu tatanan atau nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai pegangan agar supaya tercipta kondisi kehidupan yang teratur dan damai. Sehingga tidak mengherankan bila ternyata di dalam hidup bermasyarakat, manusia diikat oleh nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana digambarkan oleh Kuntjoroningrat, bahwa nilai-nilai tersebut merupakan suatu rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran bagian terbesar atau golongan tertentu dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk atau apa yang diinginkan dan apa yang dicela.⁴⁵ Nilai-nilai sosial biasanya terhimpun dalam suatu sistem yang berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi perikelakuan manusia dalam proses interaksi sosial, sehingga di dalam konkritisasinya berfungsi sebagai suatu sistem kaidah-kaidah atau sistem tata kelakuan.⁴⁶

Adapun salah satu dari kaidah atau tata kelakuan tersebut adalah kaidah hukum. Sehingga di sini antara manusia, masyarakat, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁴⁷ Bahkan antara hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ibi Societas Ibi Ius*) . Hukum tidak akan dapat bekerja efektif bila tidak dikenal atau tidak sesuai dengan konteks sosial dalam masyarakat. Hukum mempunyai fungsi konkrit dalam masyarakat, yaitu untuk mengatur hubungan-

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm.3.

hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kehidupan mereka bersama di dalam masyarakat.⁴⁸

Hampir semua bidang kehidupan diatur oleh peraturan-peraturan hukum, melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Hukum selalu memiliki andil yang semakin luas dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum semakin penting untuk diperhitungkan.

Setiap usaha masyarakat dalam pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, kondisi ini menjadikan hukum semakin penting dalam perwujudan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu.

Fungsi dari hukum diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat menurut Lawrence M. Friedman terkait erat dengan masalah budaya hukum. Hal yang dimaksudkan dengan budaya hukum disini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Budaya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan manusia dalam menentukan perilaku. Budaya berfungsi sebagai sistem perilaku dan budaya hukum sangat mempengaruhi efektifitas berlaku dan keberhasilan penegakan

⁴⁸ Ali Sastroamidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhartara, Jakarta, hlm. 9; Brierly, 1963, *Hukum Bangsa-Bangsa*, Terjemahan Moh. Radjab, Bharata, hlm.45.

hukum. Hukum merupakan kongkretisasi nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan. Kegagalan hukum modern seringkali karena tidak compatible dengan budaya hukum masyarakat.

Budaya Hukum terdiri dari :

- a. *Internal Legal Culture* : kultur yang dimiliki oleh struktur hukum
- b. *External Legal Culture* : kultur hukum masyarakat pada umumnya⁴⁹

Menurut Daniel S. Lev Budaya Hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu :

1. Budaya Hukum Prosedural :

Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik.

2. Budaya Hukum Substantif :

Asumsi-asumsi fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.⁵⁰

Hukum merupakan suatu karya kebudayaan, Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi merumuskan pengertian kebudayaan itu sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.⁵¹ Hasil karya manusia menciptakan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan materill yang diperlukan oleh manusia untuk memanfaatkan alam sekitarnya, untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaedah – kaedah serta nilai – nilai sosial dan budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah – masalah kemasyarakatan. Cipta merupakan kemampuan mental dan kemampuan berpikir

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, hlm. 118-215

⁵¹ Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 32

dari orang-orang yang hidup bermasyarakat guna berfilsafat dan menghasilkan ilmu pengetahuan.

Kebudayaan mencakup suatu sistem dan tujuan – tujuan dan nilai tertentu, artinya kebudayaan merupakan suatu blue print of behavior yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Nilai sosial dan budaya itu berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi perilaku manusia didalam proses interaksi sosial. Lebih kongkretnya lagi kebudayaan berfungsi sebagai sistem perilaku. Dengan demikian kaedah-kaedah yang berlaku sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Segala tingkah laku manusia sesungguhnya berpedoman pada konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk.⁵²

Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat. Setiap masyarakat tentu menghasilkan sebuah kebudayaan, maka hukumpun selalu ada disetiap masyarakat dan tampil dengan kekhasnya. Melihat dasar ini Wolfgang Friedman menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal.⁵³

Setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu melakukan suatu perbuatan yang disebut sosial behavior (Perilaku sosial). Salah satu unsur dari perilaku sosial adalah sosial action (perbuatan sosial). Perbuatan sosial adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para anggota suatu masyarakat. Perbuatan

⁵² Soerjono Soekanto, 1967, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hlm 24.

⁵³ Wolfgang Friedman, *Legal Theory*, Edisi ketiga, London: Stevens & Sons Limited, 1953. Satjipto Rahardjo, Op Cit, 1980.

sosial agar menjadi sebuah perbuatan hukum, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dilakukan dengan niat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. terjadi pada situasi tertentu;
- c. diatur oleh kaidah-kaidah tertentu;
- d. terdorong oleh motivasi tertentu.

Setiap bangsa mengembangkan kebiasaan hukumnya sendiri, sebagaimana bahasanya juga, tidak ada hukum negara tertentu dapat dipakai untuk bangsa dan negara lain. Menurut Von Savigny,⁵⁴ hukum itu merupakan pencerminan *volksgeist*, jiwa rakyat, yang tidak mudah untuk diterjemahkan melalui pembuatan hukum. Pernyataan ini akan lebih sesuai dengan kondisi yang ada di pedesaan dalam hubungan kekerabatan yang terjalin dengan baik.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (*Socio Legal Approach*).⁵⁵ Pendekatan sosiologi⁵⁶ digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena budaya hukum masyarakat dalam penggunaan barang merek tiruan oleh masyarakat.

⁵⁴ Pendapat Von Savigny sebagaimana di kutip oleh Wolfgang Friedman Op Cit, 1953, hlm. 137, Satjipto Rahardjo, Op Cit, 1980 an, Op Cit Esmi Warasih, 2008.

⁵⁵ Lihat Esmi Warasih Puji Rahayu; Penelitian Socio-Legal; Dinamika Sejarah, dan perkembangannya; Makalah disampaikan pada Workshop Pemuktahiran Penelitian Hukum, Bandung 20-21 Maret 2006. "Penelitian sosio-legal dengan landasan filsafat hermeneutik dan teori kritik melalui pendekatan interpretatif/verstehen diharapkan dapat menjembatani kedua metode penelitian hukum (Normatif dan Sosiologis)"

⁵⁶ Lihat Soetandjo Wignyosoebroto, Penelitian Sosial adalah penelitian dengan kebenaran temuan yang mesti dibuktikan dengan data yang berkarakter empirik. Penelitian sosial tidak diawali-mulakan dari norma-norma yang idiil dan asasi atau bertaraf ajaran. *Keraguan Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian Dan Metode Penelitiannya Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta, SH*, Refika Aditama Bandung, 2008, hlm.50

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁵⁷ dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*hystorical approach*).

2. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Berdasarkan bentuk dan pendekatan penelitian seperti ini, data primer adalah data yang dicari sendiri oleh peneliti lebih banyak bersumber dari manusia (*human source*) dalam bentuk kata-kata dan tindakan. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dengan memanfaatkan hasil penelitian pihak lain banyak bersumber dari yang bukan manusia (*non-human source*) yaitu berupa dokumen, buku, disertasi, tesis, majalah, buletin, arsip, data statistik dan lainnya.⁵⁸

Berkenaan pencarian data sekunder, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan studi literatur terhadap data yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelusuran data sekunder dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Untan. Selain itu penulis juga memanfaatkan teknologi informasi dengan melakukan penelusuran hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen, serta berita-berita terkait dengan obyek penelitian melalui media internet. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut diperoleh bahan-bahan hukum yang dapat dikategorikan menjadi :

⁵⁷ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.13

⁵⁸ Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, hlm. 17. Lihat juga Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.9

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, Tap-MPR, Undang-Undang Merek , Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang, serta bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan Hak Merek serta budaya hukum masyarakat yang menggunakan produk-produk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap responden yang dilakukan dengan wawancara yang bersifat terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap seseorang dan orang tersebut diberikan kebebasan untuk mengekspresikan jawabannya. Narasumber dan informan yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan dengan cara Purposive, yaitu penentuan yang didasarkan pada pengetahuan yang memadai dan kemampuan menjelaskan obyek penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, narasumber dan informan yang dipilih meliputi : Kepala Kantor Kanwil Hukum dan HAM berkaitan dengan perlindungan HKI, Kepala Kantor Dinas Perdagangan Propinsi Kal-Bar, Pemilihan para narasumber dan informan tersebut di atas dikarenakan mereka dianggap mengetahui persoalan-persoalan perlindungan HKI.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Pelaksanaan analisis data yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan penggunaan metode induksi. Metode induksi adalah proses penalaran dimana temuan-temuan dalam bentuk data dan informasi dari alam inderawi yang kongkrit dipakai untuk membangun teori sehingga teori yang dibangun tersebut dapat dikualifikasikan sebagai teori yang membumi.⁵⁹ Dalam pengertian yang lebih luas lagi, metode induksi adalah proses penalaran yang bertolak dari fakta-fakta khusus ke kesimpulan umum. Pencapaian kesimpulan dalam induksi menyatakan sesuatu yang melampaui apa yang telah dikatakan dalam premis-premis, sehingga kesimpulan tidak berasal dari premis-premis menurut keharusan logis.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut untuk melihat budaya hukum masyarakat pengguna produk-produk yang melanggar hak kekayaan intelektual khususnya hak merek, digunakanlah metode induksi yang dipaparkan melalui proses eksplanasi, yaitu proses untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara dua realitas yang hadir dan tersimak dalam indrawi.

G. Sistematika Penulisan

⁵⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Op.Cit*, hlm. 30

⁶⁰ Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 341

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yang masing-masing mempunyai kaitannya satu sama lain, yaitu dimulai dengan menguraikan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN terdiri dari beberapa Sub Bab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
2. BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, terdiri dari Sub Bab, yaitu : A. Pengertian Umum Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan merek, B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek , C Budaya Hukum Masyarakat Pengguna Produk-Produk Pelanggar HKI Khususnya Hak Merek , D. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pengguna Merek Secara Illegal.
3. BAB III PEMBAHASAN MASALAH, terdiri dari Sub Bab, yaitu : A. Budaya Hukum Masyarakat Yang Menggunakan Barang Merek Tiruan Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, B. Pengaturan Terhadap Masyarakat Yang Menggunakan Barang Yang Memakai Merek Tiruan, C. Pengaturan Terkait Dengan Fenomena Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan Oleh Masyarakat Guna Menunjang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek
4. BAB IV PENUTUP, merupakan Bab terakhir yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang akan dikemukakan oleh peneliti.

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG MEREK

A. Pengertian Umum Hak Kekayaan Intelektual Berkaitan Dengan Merek

Yang dimaksud dengan merek batasannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek disebut dengan UU Merek yaitu Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ”.

Dari batasan tersebut, merek pada hakikatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar “Sepotong Garis” atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “Benang Kusut”.⁶¹

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut

⁶¹ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 20

sewaktu diperdagangkan. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.⁶²

Jadi merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut.

Agar supaya suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak daripadanya ialah bahwa mereka tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai itu haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perdagangan dari seseorang daripada barang-barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan daripada barang-barang orang lain karena adanya merek itu. Jadi daya pembeda (*distinctiveness*) merupakan unsur yang pertama.⁶³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

⁶² Ibid, hlm. 20-21

⁶³ Ibid, hlm. 21

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ”. Untuk dapat mendaftarkan merek harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai merek menurut UU No. 15 tahun 2001 adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 5 UU Merek tersebut, yaitu bahwasannya merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Suatu merek meskipun tidak memiliki unsur-unsur seperti di atas, namun apabila mereka tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, maka permintaan pendaftarannya akan ditolak oleh kantor merek berdasarkan Pasal 6 UU Merek

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek

Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu mereka tidak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (*brand image*). Mereka tidak perlu repot repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu *up to date*, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya “Bandar” yang

siap untuk menerima produk jiplak tersebut.⁶⁴ Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi.

Jika dilihat dari sisi hukum hal itu sebenarnya tidak dapat ditolelir lagi karena Negara Indonesia sudah meratifikasi Kovensi Internasional tentang TRIPs dan WTO yang telah diundangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2000 Indonesia sudah harus menerapkan semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam kerangka TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Inculding Trade in Counterfeit Good*), penerapan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam TRIPs tersebut adalah merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai anggota dari WTO (*Word Trade Organization*).⁶⁵

Tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam dunia perdagangan dewasa ini merek adalah merupakan salah satu wujud karya intelektual manusia yang mempunyai peranan yang sangat menentukan karena penggunaan atau pemakaian merek pada perusahaan, tetapi juga mngandung aspek hukum yang luas baik bagi pemilik atau pemegang hak atas merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu. Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan bran imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau

⁶⁴ Laporan Penelitian : *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, diunduh dari <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>, tgl. 12 Mei 2015, jam 12.00 wib, hlm. 1

⁶⁵ Ibid, hlm. 2

daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek (*branding*) menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen.

Dalam era persaingan sekarang ini memang tidak dapat lagi dibatas masuknya produk-produk dari luar negeri ke Indonesia karena fenomena tersebut sebetulnya sudah jauh diprediksi oleh Kanichi Ohmae yang menyatakan “*bahwa pada masa mendatang dunia tidak lagi bisa dibatasi oleh apapun juga*” dan prediksi tersebut saat ini sudah nampak kebenarannya.⁶⁶ Merek sebagai aset perusahaan akan dapat menghasilkan keuntungan besar bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen yang baik. Dengan semakin pentingnya peranan merek maka terhadap merek perlu diletakan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak hak perseorangan ataupun badan hukum.

Dengan berkembangnya dunia perdagangan yang pesat dan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara, tentunya akan memberikan dampak dibidang perdagangan terutama karena adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang mana sebagai bidang tersebut merupakan faktor yang memicu globalisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam kenyataan merek terkenal biasanya didahului oleh reputasi dan “*good will*” yang melekat pada keterkenalan tersebut. Merek yang mempunyai “*good will*” yang tinggi akan mampu memberikan keuntungan yang

⁶⁶ Ibid, hlm. 2

luar biasa bagi perusahaan, meskipun sebetulnya merek adalah sesuatu yang tidak dapat diraba (*intangible*).⁶⁷

Sebuah merek akan menjelma menjadi aset capital semata-mata hanya berdasarkan pada “*good will*”, oleh karena itu menurut *Lendsford* menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memiliki reputasi merek yang tinggi (*higher reputation*) akan memiliki aset kekayaan yang luar biasa hanya berdasarkan pada “*good will*” dari merek tersebut. Produk atau jasa yang bermerek saling lebih dahulu diiklankan dan dijual, walaupun produk atau jasa tersebut secara fisik belum tersedia di pasaran negara tertentu.

Media penyebaran dan periklanan modern menjadi semakin tidak di batasi oleh batas-batas nasional mengingat canggihnya komunikasi teknologi dan frekuensi orang bepergian atau mengadakan perjalanan melintas dunia. pemilik produk atau jasa yang bermerek banyak memanfaatkan berbagai event-event yang banyak di tonton orang untuk memasarkan merek mereka sehingga orang yang melihat merasa tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasa dari suatu merek yang diiklankan tersebut.

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh

⁶⁷ Ibid, hlm 3

pemerintah, tetapi dalam praktek banyak sekali kendala-kendala sebagaimana dikatakan oleh A Zen Umar Purba (mantan Dirjen HaKI) bahwa *Law Enforcement* yang lemah.⁶⁸

Memang tidak dapat selamanya dijadikan alasan tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengapa hal itu bisa terjadi ?. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari sisi historis masyarakat Indonesia yang sejak dahulu adalah masyarakat agraris, sehingga terbiasa segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama, bahkan ada anggapan dari para pengusaha home industri bahwa merek adalah mempunyai fungsi sosial. Pada satu sisi keadaan tersebut berdampak positif tetapi pada sisi lain justru yang anggapan demikian itu menyebabkan masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inofatif.⁶⁹

Dimasukkannya Perjanjian mengenai Aspek-aspek Perdagangan yang terkait dengan HKI (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights / TRIPs*) dalam perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*),⁷⁰ HKI telah menjadi salah satu komponen penting dalam perdagangan global. Konsekuensinya, harus

⁶⁸ Ibid, hlm. 4

⁶⁹ Ibid, hlm. 5

⁷⁰ Lihat Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. WTO adalah organisasi yang bertujuan untuk mengawasi dan liberalisasi perdagangan internasional. Organisasi ini resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 1995 dengan Perjanjian Marrakesh, menggantikan Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT), yang dimulai pada tahun 1948, diakses tanggal 20 Mei 2015, http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization. Lihat juga Imas Rosidawati, *Perlindungan Hak Merek Atas Masuknya Barangbarang Palsu Dan Tiruan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen*, hlm. 1 *Proceedings of the International Conference on Consumerism 2013* (ICC2013)

mengikuti prinsip-prinsip globalisasi sebagaimana diatur dalam kesepakatan dunia itu, yakni dengan diperluasnya lingkup sistem HKI⁷¹ nasional.

Di samping itu, Indonesia pun telah meratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan dengan Persetujuan TRIPs⁷² yaitu: *Paris Convention the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Patent Cooperation Treaty ("PCT") and Regulations Onder the PCT, Trademark Law Treaty, WIPO Copyright Treaty* termasuk *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang akan mendorong perkembangan usaha, perdagangan dan industri dalam lingkup nasional maupun internasional.

Setiap produk yang memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, akan memiliki daya saing yang lebih baik, sehingga pada akhirnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi. Salah satu kendala dalam memberikan perlindungan tersebut adalah dari masyarakat Indonesia sendiri yaitu di satu sisi masih menganggap HKI merupakan "*public right*"⁷³ yang mempunyai

⁷¹ Pengelompokan sistem HKI secara rinci menurut *TRIPs* didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan HKI meliputi semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam BAB II Bagian 1 sampai dengan Bagian 7 *Agreement TRIPs*

⁷² Persetujuan TRIPs mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995, tetapi bagi Indonesia Persetujuan TRIPs mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2000, hal ini merujuk pada Pasal 65 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement 1994)*, mengenai ketentuan-ketentuan peralihan bagi negara-negara berkembang. Perjanjian multilateral ini, yang paling komprehensif terkait dengan HKI, diakses 20 Mei 2015 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm, Lihat juga Imas Rosidawati, *Perlindungan Hak Merek Atas Masuknya Barangbarang Palsu Dan Tiruan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen*, hlm. 2 *Proceedings of the International Conference on Consumerism 2013 (ICC2013)*

⁷³ Cita Citrawinda Priapantya, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang Farmasi*, dijelaskan bahwa di negara berkembang lainnya seperti Cina, HKI seringkali dianggap sebagai suatu "*public right*". Sebagai contoh, peniruan sampai sedetail-detailnya mengenai seni dan naskah-naskah tertulis dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada orang yang berkuasa. Lihat juga Imas Rosidawati, *Perlindungan Hak Merek Atas Masuknya Barangbarang Palsu Dan Tiruan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen*, hlm. 2 *Proceedings of the International Conference on Consumerism 2013 (ICC2013)*

fungsi sosial, bukan sebagai hak privat yang membutuhkan perlindungan, karena masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Bali, masyarakat Bali tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga karena dengan ditirunya produk hasil karya mereka, terdapat suatu anggapan bahwa produk tersebut memang betul-betul menarik dan hebat.⁷⁴

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas Merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang melakukan pemboncengan atas ketenaran pihak lain⁷⁵, karena Merek yang sudah dikenal masyarakat cepat laku dipasaran sehingga akan mendatangkan keuntungan relatif besar dalam waktu yang relatif cepat. Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum.⁷⁶ Perbuatan menggunakan Merek atau tanda semacam itu termasuk persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Dalam TRIPs (*Trade Related Intellectual Properties*) disebutkan, bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagai korban peniruan merek. Misalnya dalam kasus Nike di Indonesia, Mahkamah Agung RI berpendapat, bahwa menggunakan merek terkenal di dunia internasional tanpa izin dapat juga mengelabui konsumen, seolah-olah barang yang dipalsukan mereknya tersebut

⁷⁴ Imas Rosidawati, 2010, *Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, hlm. 7

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 218

⁷⁶ A. Sonny Keraf, 1993, *Etika Bisnis – Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 69.

barang asli, padahal barang tiruan tersebut mungkin mutunya lebih rendah dari barang aslinya.⁷⁷

Selain itu, pada peraturan yang tercantum dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) mensyaratkan pencantuman indikator atas asal barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Pemalsuan atas merek menjadi kendala perdagangan maupun investasi, dengan demikian Penegakan hukum merek merupakan sebuah komitmen yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO. Hak Merek merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang fair.

Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, dan juga untuk membedakan barang atau jasa sejenis dari produksi satu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya⁷⁸, agar perilaku bisnis tidak merugikan konsumen serta ketentuan-ketentuan tentang perlindungan konsumen dapat ditaati oleh pihak-pihak terkait. Penggunaan merek secara tanpa hak (pemalsuan merek) saat ini perlu diwaspadai karena adanya kemungkinan unsur subversif melalui pemalsuan obat-obatan, makanan, minuman dan kosmetika serta barang-barang lainnya, dan menggunakan merek-merek pihak lain yang sudah terkenal yang dapat merongrong kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi. IIPA⁷⁹ telah merekomendasikan 41 negara untuk ditempatkan sebagai Negara yang berpredikat *Priority Watch List* atau *Watch List*, untuk tujuan pemantauan berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Perdagangan, AS.

⁷⁷ Imas Rosidawati, *Perlindungan Hak Merek Atas Masuknya Barangbarang Palsu Dan Tiruan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen*, hlm. 2 Proceedings of the International Conference on Consumerism 2013 (ICC2013)

⁷⁸ Tim Lindsey et al.(editor), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 132

⁷⁹ Lihat "*International Intellectual Property Alliance (IIPA)*, February 10, 2012."

Dalam laporan tersebut, Indonesia ditempatkan dalam Negara-negara berpredikat *priority watch list* bersama dengan sembilan negara lainnya (Argentina, Kanada, Chili, Cina, Kosta Rika India, Rusia, Thailand, dan Ukraina). Negara yang berpredikat *Priority Watch List* dinilai oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR)⁸⁰ sebagai negara yang memiliki "pelanggaran HKI serius" sehingga membutuhkan peningkatan perhatian.⁸¹ Bila masyarakat disuruh untuk memilih salah satu barang yang menggunakan merek luar negeri dan dalam negeri maka masyarakat lebih suka untuk menggunakan barang dengan merek luar negeri walaupun harga jauh lebih mahal.

Dari hasil pengamatan dilapangan merek yang sering dipalsukan kebanyakan adalah merek-merek dari luar negeri dan merek-merek yang sudah terkenal. Tindakan tersebut secara tidak langsung akan menyuburkan para pengguna merek secara tanpa hak (pemalsu merek) dan dapat merusak citra bangsa Indonesia di pasar global. Praktek-praktek yang tidak beretika akan menghadirkan moral hazard⁸² diberbagai sektor ekonomi dan politik yang harus ditanggung bersama semua elemen bangsa.

Permasalahan moral hazard sudah cukup luas dan mendalam, dalam skala yang luas, faktor moral dan etika harus dimasukkan sebagai variabel ekonomi yang penting, khususnya dalam pola tingkah laku berekonomi dan berbisnis.⁸³

⁸⁰ *The Office of the United States Trade Representative (USTR)* adalah Instansi di Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk merekomendasikan kebijaksanaan Amerika Serikat yang terkait dengan perdagangan, kemudian melakukan negosiasi perdagangan pada tingkat bilateral dan multilateral, dan mengkoordinasikan kebijakan perdagangan melalui *Trade Policy Staff Committee (TPSC)* and *Trade Policy Review Group (TPRG)*, http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_United_States_Trade_Representative, diakses pada tanggal 24 Februari 2012.

⁸¹ "Special 301 Report", diakses 20 mei 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Special_301_Report.

⁸² Pengertian *moral hazard* dalam hal ini adalah resiko yang harus ditanggung secara moral.

⁸³ Stephen Haggard, *The Political Economy of the Asian Financial Crisis* (Washington: Institute for International Economics, 2000), hlm 15-16.

Tingkah laku para pelaku bisnis pada era globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, menyebabkan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara semakin cepat dan meluas.⁸⁴ Praktek pemalsuan merek merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Tindak pidana merek dikategorikan sebagai delik aduan, pertimbangan untuk pembenaran sebagai delik aduan dikaitkan dengan kemampuan sumber daya manusia, baik polisi maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan keterbatasan sarana penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Bila sebagai delik maka beban aparat penegak hukum menjadi sangat berat, karena secara teoritis aparat penegak hukum harus pro-aktif tanpa tergantung ada atau tidaknya pengaduan. Selain itu berkaitan dengan HaKI merupakan hak perdata sehingga negara tidak berhak mencampurinya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkannya.⁸⁵

Delik aduan ada 2 (dua) macam, yaitu absolut dan relatif. Dalam hal ini penentuan delik aduan bukan sepenuhnya berkaitan dengan pemikiran sebagai upaya/pencegahan (*preventie*). Formulasi tindak pidana merek ini penting karena di satu sisi merupakan dasar penanganan aplikasi dalam sistem peradilan pidana agar lebih efektif dan efisien sebagai wujud penegakan hukum pidana untuk mendukung proses ekonomi bisnis, khususnya norma dan nilai di bidang HaKI,

⁸⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4.

⁸⁵ Purba A. Zen Umar, *Pokok-Pokok Pembangunan Sistem HaKI Nasional Advanced Seminar : Prospect and Implementation of Indonesian Corporation Rights, Patent and Trade Mark Law*, 2000, hlm. 5

sedangkan masyarakat ternyata lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.⁸⁶

Upaya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik hak kekayaan intelektual yang dilanggar HKInya dapat menggunakan berbagai cara yaitu :⁸⁷

1) Gugatan Ke Pengadilan Niaga

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang sah, yaitu pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Niaga terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.⁸⁸

Dalam pengaturan lisensi, selain pemilik merek, penerima lisensi (*license*) mereka terdaftar dapat mengajukan gugatan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek terdaftar tersebut. Dalam masa pemeriksaan dan dalam rangka untuk mencegah kerugian secara lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat meritahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan /atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak. Terhadap tuntutan penyerahan barang kepada tergugat, hakim dapat juga memerintahkan bahwa

⁸⁶ Maulana Insan Budi, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, hlm. 167, Lihat juga Saifur Rachman, Artikel : *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia*, <http://renaisans-unibo.blogspot.com/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-merek.html>, diunduh tanggal 25 Mei 2015 jam 12.00 wib

⁸⁷ Ronna Novy Yosia Taliwongso, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia*, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, hlm. 155

⁸⁸ Hery Firmasyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta, hlm. 75.

penyerahan barang tersebut dapat dilaksanakan, setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Pengajuan Kasasi

Terhadap putusan pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek dapat diajukan kasasi. Tata cara mengajukan permohonan kasasi sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi, diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.
- b. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- c. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- d. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan selanjutnya panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi di terima panitera.
- e. Setelah kontra memori disampaikan pada pemohon kasasi, panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada mahkamah Agung paling lama 7 (tuju) hari.
- f. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

- g. Sidang acara pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pemohon kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- h. Putusan atas permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- i. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada penitara paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi.
- j. Juru sita selanjutnya wajib menyampaikan isi putusan kasasi, kepada pemohon dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.⁸⁹

3) Penetapan Sementara

Penetapan sementara atau *injunction* ini merupakan hal baru dalam sistem hukum acara di Indonesia. Penetapan sementara ini adalah sistem yang sering diterapkan dalam *commont wealth legal system*. Sedangkan prinsip yang digunakan tetap pada praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Perlunya penetapan sementara ini sebagai sarana atau upaya hukum bagi pemohon terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan hukum yang diduga berdasarkan bukti yang cukup akan merugikan pemohon dan pelanggaran merek terdaftar.

Perlindungan hukum bagi pemegang merek selain oleh undang-undang juga dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mengenai tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait penindakan terhadap para penjual barang palsu,

⁸⁹ Ibid, hlm. 78

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Merek, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (PPNS HKI) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#), untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

PPNS HKI berwenang (Pasal 89 ayat (2) UU Merek) :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduantersebut pada huruf a;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Direktorat Penyidikan HKI juga berfungsi untuk memonitor penegakan hukum HKI, memberikan peringatan terhadap pelanggar HKI, litigasi dan menjadi ahli HKI dalam proses hukum. Dijelaskan juga bahwa selama ini peran monitoring tidak dilakukan oleh Ditjen HKI. Baru setelah ada Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI (Timnas HKI) yang dibentuk pada 27 Maret 2006, pemantauan penegakkan HKI dilakukan. Mengenai Timnas HKI, dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Keppres 4/2006). Dalam Pasal 1 Keppres 4/2006,

dikatakan bahwa dibentuk Timnas HKI, untuk mengkoordinasikan penanggulangan pelanggaran HKI di Indonesia, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Timnas HKI bertugas antara lain (Pasal 2 Keppres 4/2006) :

- a. merumuskan kebijakan nasional penanggulangan pelanggaran HKI;
- b. menetapkan langkah-langkah nasional yang diperlukan dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI;
- c. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran HKI, termasuk pencegahan dan penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing anggota;
- d. melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pendidikan di bidang HKI guna penanggulangan pelanggaran HKI kepada instansi, lembaga terkait dan masyarakat melalui berbagai kegiatan;
- e. mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI

C. Budaya Hukum Masyarakat Pengguna Produk-Produk Pelanggar HKI Khususnya Hak Merek

Hukum merupakan suatu sistem, artinya hukum itu merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian (sub sistem) dan antara bagian-

bagian itu saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya.

Bagian atau sub sistem dari hukum itu terdiri dari⁹⁰ :

- a. Struktur Hukum, yang merupakan lembaga-lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan, dan lain-lain;
- b. Substansi hukum, yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan;
- c. Budaya hukum, yang merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Ketiga sub sistem tersebut di atas tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang saling berkait dan saling menopang sehingga pada akhirnya mengarah kepada tujuan (hukum) yaitu kedamaian. Uraian berikut ini tidak akan membicarakan ketiga sub sistem itu, melainkan hanya akan membahas sub sistem budaya hukum yang pada hakikatnya berisi nilai-nilai.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa (etnis), memiliki berbagai agama, menggunakan bahasa masing-masing (bahasa daerah), serta memiliki adat istiadat yang beraneka ragam. Di samping itu karena kemajuan ilmu dan teknologi, masyarakat Indonesia memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang lazimnya disebut golongan profesi.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan*, makalah Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Surabaya, 17 November 1984, hlm.3

Akibatnya di dalam masyarakat Indonesia terdapat kebudayaan nasional, tetapi sekaligus juga ada budaya khusus sesuai dengan kemajemukan serta golongan profesi seperti disebutkan di atas. Budaya khusus tadi berhubungan dengan budaya hukum. Dengan demikian setiap kelompok etnis dan golongan profesi memiliki budaya hukum tersendiri pula. Budaya hukum khusus tersebut memiliki pengaruh terhadap aktifitas serta kebiasaan dalam interaksi dan transaksi dagang masyarakat, dimana budaya hukum yang baik akan menghasilkan nilai yang baik.

Nilai merupakan konsepsi abstrak tentang sesuatu yang dianggap baik sehingga dianut/ diturut atau sesuatu yang dianggap buruk sehingga dihindari. Sesuatu yang dianggap baik oleh manusia mungkin menyenangkan, memenuhi keinginan, atau dianggap penting. Oleh sebab itulah nilai merupakan suatu penggerak manusia untuk berperilaku atau bersikap tindak tertentu dalam usaha memenuhi keinginan, kesenangan, atau kepentingannya. Namun demikian dalam merealisasikan sesuatu yang dianggap baik itu tidak boleh menyebabkan tidak enak bagi pihak lain.

Dengan demikian nilai dalam hukum itu selalu berpasang-pasangan, satu nilai tidak berdiri sendiri, ia dibatasi oleh nilai pasangannya. Sebagai contoh kebebasan itu dianggap baik oleh seseorang, akan tetapi kebebasan itu tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan itu dibatasi oleh ketertiban sehingga kebebasan orang lain juga terjamin. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh nilai-nilai hukum antara lain yaitu⁹¹ :

⁹¹ Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi*, Rajwali, 1991, hlm. 41-50

- a. Kebebasan - Ketertiban
- b. Kepastian Hukum – Kesebandingan Hukum
- c. Proteksi Hukum – Restriksi Hukum
- d. Konservatisme – Inovatisme
- e. Kolektivisme – Individualisme
- f. Ketaatan Hukum – Keluwesan Hukum

Nilai-nilai tersebut di atas sering bertegangan atau saling mendesak, sehingga timbul ketegangan nilai. Hal lain dapat terjadi bila kebebasan terlalu tinggi sehingga ketertiban tidak terjamin. Atau sebaliknya ketertiban yang diterapkan penguasa terlalu tinggi, sehingga menekan kebebasan orang. Gejala ini terlihat dari adanya unjuk rasa, pemberontakan separatisme, dan lain-lain. Ketegangan nilai dapat dikurangi atau dihilangkan dengan memperkecil nilai yang mendesak dan dengan sendirinya memperbesar nilai yang terdesak. Bila nilai yang berpasang-pasangan itu tidak berada dalam posisi saling mendesak atau bertegangan maka nilai tersebut dinamakan serasi (harmonis). Nilai yang berada dalam keadaan yang serasi itu merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh hukum. Dengan perkataan lain keserasian itu adalah tujuan hukum.

Nilai-nilai hukum masih sangat abstrak dan belum operasional. Padahal hukum menghendaki hal yang konkret dan operasional (sudah dapat diterapkan). Agar nilai itu operasional, ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam asas hukum (*Rechtsbeginsel, Principle of Law*). Asas hukum itu sendiri bukanlah norma

hukum, ia belum operasional, artinya ia belum dapat diterapkan pada kasus konkret⁹².

Dengan demikian bila terjadi pelanggaran terhadap nilai dan asas hukum, si pelanggar belum dapat ditindak dan dihukum. Agar nilai dan asas hukum itu operasional, ia terlebih dahulu harus diwujudkan dan diberi bentuk norma hukum. Dengan demikian norma hukum itu haruslah berdasarkan atau tidak boleh bertentangan dengan nilai dan asas hukum. Norma hukum yang tidak berdasarkan pada nilai dan asas hukum adalah sewenang-wenang dan menurut pangang teori hukum alam, norma hukum yang demikian tidak memiliki keabsahan (legitimasi). Proses perwujudan nilai dan asas hukum ke dalam norma hukum dinamakan pernyataan norma hukum (*beslissing*) yang berupa norma abstrak yang berlaku umum seperti undang-undang, atau norma kongkret yang berlaku khusus seperti penetapan (*beschikking*)⁹³.

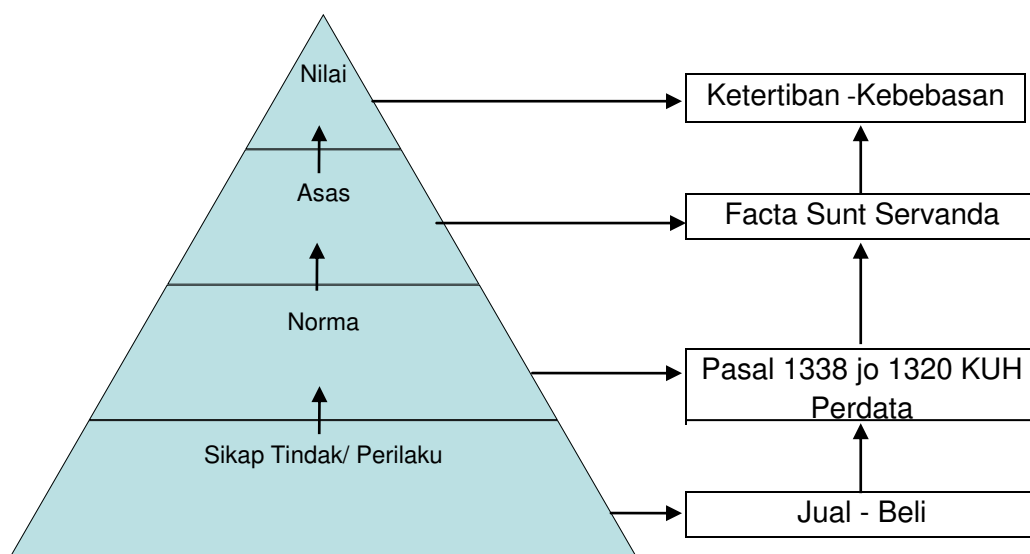
Norma abstrak yang berlaku umum atau perundang-undangan selanjutnya menjadi dasar atau landasan dari sikap tindak atau perilaku. Dengan perkataan lain sikap tindak atau perilaku haruslah sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Sikap tindak atau perilaku yang bertentangan dengan perundang-undangan tersebut dapat berupa :

- a. Bertindak melebihi kekuasaan (*excess de pouvoir*) di bidang Hukum Tata Negara;
- b. Bertindak menyalahgunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*) di bidang Hukum Administrasi Negara;
- c. Penyelewengan perdata (*onrechtmatiggedaad*) di bidang hukum perdata;
- d. Tindak pidana (*delic, strafbaarfeit*) di bidang hukum pidana.

⁹² Mustafa Abdullah, *Budaya Hukum di Era Reformasi*, Ceramah Ilmiah di depan civitas akademika dan wisudawan Universitas Batanghari, Jambi, 2005, hlm.11

⁹³ Purnadi Purbacaraka, *Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan*, makalah Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Surabaya, 17 November 1984, hlm.5-6

Hubungan antara nilai, asas, norma, dan sikap tindak atau perilaku sebagaimana telah diuraikan di atas dapat digambarkan dalam “*stufenbau* hukum” sebagai berikut⁹⁴:



Catatan : Tanda (↑) menunjukkan bahwa bagian yang ditunjuk oleh panah tersebut adalah dasar atau landasan bagi yang berada di bawahnya.

Apabila keempat komponen tersebut (nilai, asas, norma dan sikap tindak) tidak bertentangan satu sama lainnya, maka terjadilah penegakkan hukum. Sebaliknya apabila sikap tindak/perilaku bertentangan dengan norma atau norma bertentangan dengan asas atau asas bertentangan dengan nilai, maka hukum menjadi tidak tegak. Sikap tindak atau perilaku merupakan penjabaran nilai pada tahap akhir.

Masyarakat Indonesia terbentuk dari berbagai etnis (sub-bangsa) yang menganut berbagai agama dan kepercayaan dan menggunakan berbagai bahasa. Di samping itu pada masyarakat Indonesia terdapat berbagai golongan profesi

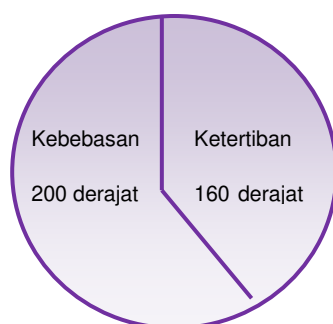
⁹⁴ Purnadi Purbacaraka, *ibid*, hlm.6

yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus. Setiap etnis dan golongan profesi memiliki budaya yang khusus. Dengan demikian setiap etnis dan golongan profesi memiliki nilai yang khusus pula.

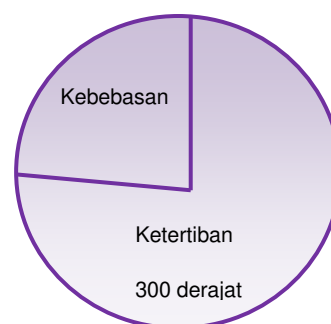
Apa yang dimaksud ketertiban pada etnis atau golongan profesi tertentu mungkin berbeda pengertiannya bagi etnis dan golongan profesi lainnya. Konsepsi nilai yang dianut oleh suatu etnis tertentu atau golongan tertentu mungkin berbeda dengan konsepsi nilai yang dianut secara nasional.

Konsepsi nilai ketertiban-kebebasan yang dianut oleh golongan Islam akan berbeda dengan konsepsi nilai secara nasional. Jika konsepsi pasangan nilai dari dua golongan di atas diterapkan pada kasus judi dan minuman keras, mungkin yang terjadi adalah bahwa golongan Islam akan lebih mengutamakan nilai ketertiban dengan kebebasan agak kecil. Sebaliknya konsepsi nilai secara nasional lebih mengutamakan kebebasan dengan ketertiban agak kecil. Uraian di atas dapat dilustrasikan secara hipotesis sebagai berikut

Konsepsi nilai secara nasional



Konsepsi nilai golongan Islam



Demikian juga halnya jika terjadi pelanggaran hukum oleh golongan tertentu, dimana penegak hukumnya berasal dari golongan yang sama dengan si

pelanggar, maka ada kecenderungan kuat bagi penegak hukum tersebut untuk memberi toleransi terhadap pelanggaran tersebut. Misalnya terdapat kecenderungan kuat penduduk Indonesia untuk mentoleransi penggunaan merek-merek tertentu yang tidak seharusnya digunakan karena merupakan milik eksklusif pihak lain.

Hal lain yang timbul dari perbedaan konsepsi nilai dari golongan profesi ialah kekebalan institusional. Berikut akan ditinjau sepintas golongan yang berkecimpung dalam proses hukum yaitu⁹⁵ :

- a. Hakim
- b. Jaksa
- c. Polisi
- d. Petugas Pemasyarakatan
- e. Penasihat Hukum
- f. Notaris
- g. Pemerintah

Masing-masing profesi tersebut di atas memiliki nilai yang kemudian diwujudkan dalam kode etik profesi. Jika terjadi pelanggaran hukum dari salah satu golongan tersebut ada kecenderungan kelompok itu untuk melindungi anggotanya yang melanggar. Apalagi hanya golongan mereka yang memiliki kemampuan untuk memeriksa apakah telah terjadi pelanggaran profesi atau tidak. Akibat yang timbul ialah sangat sulit untuk menindak anggota suatu golongan yang diduga telah melakukan pelanggaran

Hakikat hukum berupa ide atau konsep-konsep yang abstrak, namun dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Penuangan ide melalui suatu rangkaian kegiatan agar dapat menjadi nyata sebagai suatu proses transaksi dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami hanya sebatas ide yang abstrak,

⁹⁵ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm.5

hukum hendak pula dilihat sebagai suatu sistem. Secara mendasar hal pokok yang terkandung dalam sistem meliputi :

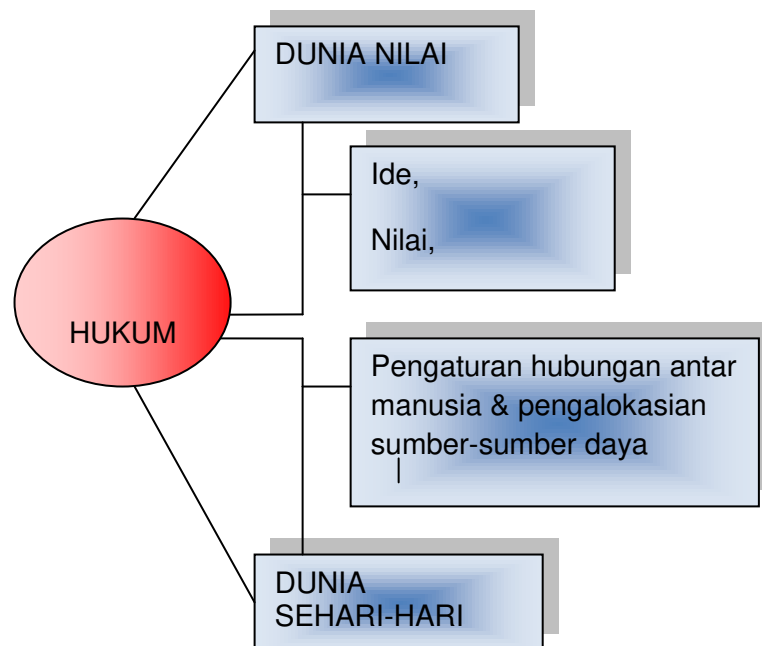
- 1). Hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, tetapi merupakan perangkat tradisi, obyek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya
- 2). Hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh
- 3). Pengertian sistem :
 - a. Berorientasi pada satu tujuan
 - b. Lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian
 - c. Berinteraksi dengan sistem lain yang lebih besar
 - d. Bekerjanya bagian-bagian menciptakan sesuatu yang berharga.⁹⁶

Hukum merupakan bagian dari lingkungan sosial, dengan demikian hukum merupakan salah satu sub sistem di antara sub sistem-sub sistem yang lain, seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Hal ini berarti hukum tidak dapat dilepas pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Dengan demikian hukum berada diantara dua nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari.⁹⁷

Hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial). Hal ini membawa suatu konsekuensi terjadi suatu ketegangan disaat hukum akan diterapkan. Ketika hukum yang sarat nilai itu akan diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.

⁹⁶ William A. Shrode & Dan J.R Voich Organization and Management, Basic System Concept, Tallahassee, Fla : Florida State University Press, 1974, Juga dalam Esmi Warasih, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hal 79

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, Op Cit, halaman 170.



Secara Sosiologis : hukum sebagai sistem nilai yang merupakan sub sistem dari sistem sosial (T. Parsons)⁹⁸

Ketika kita membicarakan persoalan hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum, yaitu :

1. Komponen Struktur;

Ialah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu.

2. Komponen Substansi;

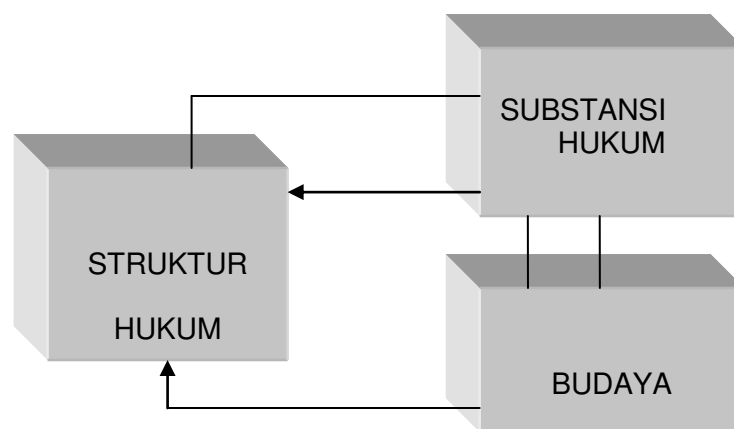
Ialah berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya.

3. Komponen Kultural.

Ialah terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum.⁹⁹

⁹⁸ Ibid

Semua merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan sistem hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Budaya hukum yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik pula. Masyarakat yang budaya hukumnya baik akan mampu menilai mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan.



Jika dilihat dari teori Sistem Hukum *Lawrence M. Friedman*¹⁰⁰, maka masyarakat hukum dikategorikan sebagai struktur hukum, akan tetapi kalau dilihat secara yuridis, maka masyarakat hukum itu, bukan hanya sebagai struktur yang bertugas melaksanakan hukum tetapi sekaligus sebagai subjek hukum. Setiap masyarakat memiliki struktur atau kelembagaan tersendiri didalamnya, baik bersifat formal maupun yang non formal seperti adat serta kebiasaan yang telah melembaga.

Secara substansi norma-norma serta tatanan dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat oleh negara menjadi suatu hal yang menunjang dalam suatu

⁹⁹ Lawrence Friedman, *The Legal System*, 1975:5

¹⁰⁰ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika sebuah Pengantar*, Penerjemah Wishnu Basuki, 2001, Jakarta, Tata Nusa.

sistem hukum. Hal yang dominan pula dalam masyarakat yang memperlihatkan aktifitas serta interaksi didalam hubungan antar mereka menjadi dasar ketiga dalam membangun suatu sistem. Ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang sesuatu. Kultur hukum dibedakan dalam dua hal, yaitu: *internal legal culture*, dan *exsternal legal culture* menyangkut kultur hukum masyarakat secara umum.

Hukum tidak dapat ditransplantasikan antar masyarakat, hukum harus mendapat dukungan kultural dari masyarakat. Hukum merupakan refleksi dari sistem dan nilai sosial masyarakat, hukum adalah produk *reinstitutionalization of norm* menurut Paul Bohanan, serta kasus di Pengadilan Kepulauan Fiji dimana Pengadilan dan Hukum yang dibawa Inggris ditolak oleh masyarakat menjadi contoh bahwa hukum harus mendapat dukungan dari masyarakat.¹⁰¹

Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat, karena hukum merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja didalam masyarakat. Hal ini menakibatkan hukum tidak dapat lepas dari gagasan maupun pendapat yang hidup dalam kalangan anggota masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial, agar hukum dimungkinkan untuk diterapkan.

Emile Durkheim¹⁰², menyatakan bahwa dalam hubungan fungsional antara sistem hukum dan masyarakat dapat dibedakan antara masyarakat dengan "Solidaritas Mekanik" dengan masyarakat dengan solidaritas organik. Masyarakat dengan solidaritas mekanik mendasarkan diri pada sifat kebersamaan antara

¹⁰¹ The Law Of the on Transferability of Law, Robert Seidman

¹⁰² Esmi Warassih, 2008, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 101

anggota-anggotanya yang lebih bersifat "represif". Sebaliknya masyarakat dengan solidaritas organik lebih mendasarkan diri pada individualisme dan kebebasan para anggotanya dan lebih bersifat "restitutif".

Menurut Bushar Muhammad,¹⁰³ siapapun yang ingin mengetahui berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang jual beli barang, lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga hukum tentang milik tanah, dll harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya Bushar Muhammad mengatakan bahwa didalam hukum adat, struktur masyarakat menentukan sistem(struktur) hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu.¹⁰⁴

Van Vollenhoven,¹⁰⁵ mengatakan bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan didaerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai hukum hidup sehari-hari. Hampir semua bidang kehidupan diatur oleh peraturan-peraturan hukum, melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia.

Hukum selalu memiliki andil yang semakin luas dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan masalah eektivitas penerapan hukum semakin penting untuk diperhitungkan. Setiap usaha masyarakat dalam pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, kondisi

¹⁰³ Bushar Muhammad, *Azas-azas Hukum Adat*, Suatu Pengantar, 1997, Jakarta, Padnya Paramita.

¹⁰⁴ Bushar Muhammad, 1987, loc, cit

¹⁰⁵ Van Vollenhoven, 1901, *Pendesakan Terhadap Hukum Adat*. Dilanjutkan tahun 1905, "Jangan memperlakukan Hukum Ciptaan Akal Juris (Hukum untuk Hakim) atas orang pribumi." dan pembelaan Van Vollenhoven pada tahun 1909, "Pengingkaran Hukum Adat", pada tahun 1917, " Perjuangan Membela Hukum Adat, serta tahun 1925, " Karya Kenfeksi Hukum.

ini menjadikan hukum semakin penting dalam perwujudan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu.

Fungsi dari hukum diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat menurut Lawrence M. Friedman terkait erat dengan masalah budaya hukum. Hal yang dimaksudkan dengan budaya hukum disini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Budaya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan manusia dalam menentukan perilaku. Budaya berfungsi sebagai sitem perilaku dan budaya hukum sangat mempengaruhi efektifitas berlaku dan keberhasilan penegakan hukum. Hukum merupakan kongkretisasi nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan. Kegagalan hukum modern seringkali karena tidak *compatible* dengan budaya hukum masyarakat.

Budaya Hukum terdiri dari :

- a. *Internal Legal Culture* : kultur yang dimiliki oleh struktur hukum
- b. *External Legal Culture* : kultur hukum masyarakat pada umumnya¹⁰⁶

Menurut Daniel S. Lev Budaya Hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu :

1. Budaya Hukum Prosedural :

¹⁰⁶ Ibid

Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik.

2. Budaya Hukum Substantif :

Asumsi-asumsi fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.¹⁰⁷

Hukum merupakan suatu karya kebudayaan, Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi merumuskan pengertian kebudayaan itu sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.¹⁰⁸ Hasil karya manusia menciptakan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan materill yang diperlukan oleh manusia untuk memanfaatkan alam sekitarnya, untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaedah-kaedah serta nilai-nilai sosial dan budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Cipta merupakan kemampuan mental dan kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat guna berfilsafat dan menghasilkan ilmu pengetahuan.

Kebudayaan mencakup suatu sistem dan tujuan-tujuan dan nilai tertentu, artinya kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Nilai sosial dan budaya itu berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi perilaku manusia didalam proses interaksi sosial. Lebih kongkretnya lagi kebudayaan berfungsi sebagai sistem perilaku. Dengan demikian kaedah-kaedah yang berlaku sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya dari

¹⁰⁷ Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, hlm. 118-215

¹⁰⁸ Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia. Jakarta, hlm. 32

masyarakat yang bersangkutan. Segala tingkah laku manusia sesungguhnya berpedoman pada konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk.¹⁰⁹

Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat. Setiap masyarakat tentu menghasilkan sebuah kebudayaan, maka hukumpun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan kekhasnya. Melihat dasar ini Wolfgang Friedman menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal.¹¹⁰

Setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu melakukan suatu perbuatan yang disebut *sosial behavior* (Perilaku sosial). Salah satu unsur dari perilaku sosial adalah *sosial action* (perbuatan sosial). Perbuatan sosial adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para anggota suatu masyarakat. Perbuatan sosial agar menjadi sebuah perbuatan hukum, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- e. dilakukan dengan niat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu;
- f. terjadi pada situasi tertentu;
- g. diatur oleh kaidah-kaidah tertentu;
- h. terdorong oleh motivasi tertentu.

Setiap bangsa mengembangkan kebiasaan hukumnya sendiri, sebagaimana bahasanya juga, tidak ada hukum negara tertentu dapat dipakai untuk bangsa dan negara lain. Menurut Von Savigny,¹¹¹ hukum itu merupakan pencerminan

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, 1967, *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

¹¹⁰ Wolfgang Friedman, *Legal Theory*, Edisi ketiga, London: Stevens & Sons Limited, 1953. Satjipto Rahardjo, Op Cit, 1980.

¹¹¹ Pendapat Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Wolfgang Friedman Op Cit, 1953, hal. 137, Satjipto Rahardjo, Op Cit, 1980 & Op Cit Esmi Warassih, 2008.

volksgeist, jiwa rakyat, yang tidak mudah untuk diterjemahkan melalui pembuatan hukum. Pernyataan ini akan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia umumnya yang masih menganggap menggunakan barang-barang bermerek palsu yang dibuat oleh produsen bukan sebuah kesalahan, apalagi tidak ada atau belum terdapatnya sanksi hukum bagi masyarakat selaku konsumen yang mempergunakan serta membeli barang-barang hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual

D. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pengguna Merek Secara Illegal

Pada tahun 1961 Indonesia mempunyai Undang-undang baru mengenai merek perusahaan dan perniagaan LN. No. 290 Tahun 1961. Undang-Undang tersebut disusun secara sederhana hanya berjumlah 24 pasal dan tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek. Selain itu, asal undang-undang merek tersebut sama dengan undang-undang merek sebelumnya yang ditetapkan oleh Belanda, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian dan politik pada saat itu yang masih memprihatinkan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri serta sejalan dengan terbukanya sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada saat itu maka sangketa-sangketa merek mulai muncul.

Dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan banyak sengketa-sengketa merek pada saat itu terutama antara pemilik merek terkenal dengan pengusaha lokal, hal tersebut disebabkan karena :¹¹²

1. Terbukanya sistem ekonomi nasional, sehingga pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal untuk digunakan dan didaftar lebih dulu di Indonesia demi kepentingan usahanya.
2. Pemilik merek terkenal belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Indonesia.

Banyaknya sengketa merek sampai pada dekade 80-an, maka pada tahun 1987 pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.01.01 Tahun 1987 tentang “*Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Orang lain*”. Dengan adanya ketentuan tersebut maka banyak sekali pemilik merek terkenal yang mengajukan gugatan pembatalan mereknya dan banyak pula perpanjangan merek yang ditolak oleh kantor merek dikarenakan mempergunakan merek orang lain. Keputusan tersebut kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 untuk lebih memberikan perlindungan terhadap pemilik merek-merek terkenal.

Selama masa berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, banyak sekali perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia perdagangan, dimana norma dan tatanan dagang telah berkembang dan berubah dengan cepat,

¹¹² Laporan Penelitian : *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, diunduh dari <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>, tgl. 12 Mei 2015, jam 12.00 wib, hlm. 2

hal tersebut menyebabkan konsepsi yang tertuang dalam Undang-undang merek Tahun 1961 sudah sangat tertinggal jauh sekali. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut maka pemerintah pada waktu itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek (LN. No.81 Tahun 1992) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.

Sebagai Negara penandatangan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement On Tariff and Trade*) dalam putaran Uruguay (*Uruguay Round*), Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Sejalan dengan itu maka pemerintah membuat kebijakan baru dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan diubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tujuan dari penyempurnaan tersebut tidak lain adalah mengakomodasikan ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi komitmen internasional mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual khususnya merek di Indonesia yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagai berikut :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90);

2. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 91);
3. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat 1);
4. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat 1)
5. Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis; (Pasal 92 ayat (3):
6. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut (Pasal 93);
7. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 (Pasal 94 ayat 1);

Pasal 94 ayat (2) menyatakan Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (1) adalah pelanggaran dan sesuai dengan Pasal 95: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Perubahan atau penyempuurnaan itu pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan Konvensi Paris (*Paris Convention For The Protection Of Industriale Property*) pada tahun 1883, selain itu juga disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan TRIPs (*Trade Releated Aspects Of Intelectual Property Right Including Trade In Counterfeit Goods*) atau aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan Intelektual.

PerjanjianTRIPS mengatur tentang kewajiban negara anggota untuk menyediakan prosedur dan upaya hukum dalam hukum nasional untuk menjamin bahwa HKI dapat secara efektif ditegakkan. Membicarakan “penegakan”, biasanya tentang penegakan hukum secara pidana yaitu negara menggunakan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak orang lain. Tetapi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Merek, penegakan hukumnya tersedia berbagai macam upaya hukum untuk membantu pemegang hak (pemilik atau pemakai HKI) untuk melaksanakan hak yang dimilikinya. Upaya tersebut bukan saja sanksi pidana, tetapi juga upaya hukum perdata; pemeriksaan dan sanksi administratif; Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Arbitrase And Alterbative Disputes Resolution /ADR*) serta sanksi perdagangan internasional.

Tindak pidana di bidang Merek telah diatur tersendiri dalam Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dengan denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pelanggaran terhadap pasal-pasal dengan ancaman pidana dan atau denda tersebut merupakan delik aduan (*klacht delict*). Artinya bahwa hanya dengan adanya laporan atau *klacht* dari si pemilik merek bersangkutan, maka akan dituntut dan dikenakan sanksi atau diadakan penyidikan.

Untuk menyesuaikan dengan perjanjian TRIPS, beberapa ketentuan dalam perundangundangan HKI di Indonesia telah diamandemen secara khusus yang menghasilkan beberapa perubahan mendasar dalam hukum acara di Indonesia. Beberapa ciri-ciri khusus yang membedakan dengan hukum acara umum yaitu:

- a) Semua kasus perdata HKI berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Niaga;
- b) Masa pemberian putusan baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat tinggi dibatasi oleh waktu tertentu;
- c) Jika para pihak tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama tidak dapat diajukan banding, namun langsung kasasi ke Mahkamah Agung (dimaksudkan untuk menghindari penundaan waktu dari pihak yang dikalahkan);
- d) Ada kemungkinan dilaksanakan penetapan sementara berupa suatu perintah yang diajukan sebelum kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga, khususnya untuk mengumpulkan barang bukti dan mencegah barang-barang hasil pelanggaran (barang palsu, tiruan dan bajakan) dipasarkan;
- e) Bentuk dan pelanggaran HKI secara spesifik disebut dalam UU HKI.

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual khususnya merek dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) atau (*administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam :¹¹³

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan

¹¹³ Ronna Novy Yosia Taliwongso, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia*, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, hlm. 151-152

perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

2. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹¹⁴

Menurut Hery Firmasyah, perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan ajuran-ajuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.¹¹⁵

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif adalah :

a. Faktor Hukum.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 5 undang-undang merek menentukan

¹¹⁴ Zein, Ahmad, Yahya, 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, hlm. 54

¹¹⁵ Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta, hlm. 67.

bahwa merek tidak dapat di daftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bahwa ini:

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Tidak milik daya pembeda;
- 3) Telah menjadi milik umum; atau
- 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

b. Faktor Aparat Direktorat Merek.

Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Hal yang paling mendasar yang perlu dicermati oleh aparat Direktorat Merek:

- 1) Terjadinya pendaftaran suatu merek tertentu yang sama dan menyerupai dengan merek terkenal milik pihak lain dapat terjadi, salah satunya di sebabkan kelemahan dari aparat Direktorat Merek dalam melakukan proses filterisasi di awal pengajuan Merek tersebut oleh masyarakat.
- 2) Penguasaan bahasa asing di lingkungan aparat Direktorat Merek perlu terus ditngkatkan, persoalan ini menjadi problematika tersediri ketika dilakukan pemeriksaan merek, penguasaan teknologi di era sekarang ini juga harus menjadi bahan peratian serius Direktorat Merek seperti: penggunaan internet *on-line* kepada masyarakat tentunya sangat memudahkan bagi pihak-pihak ingin melakukan pendaftaran merek untuk segera dapat mengetahui apakah merek yang akan di daftarkanya tersebut telah di miliki oleh pihak lain atau belum. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya merek yang sama yang

terdaftar dua kali didalam daftar umum merek, serta dapat memudahkan kerja Direktorat Merek dalam mempertimbangkan adanya merek-merek terkenal asing yang belum didaftarkan di Indonesia.¹¹⁶

¹¹⁶ *Ibid*, hlm, 68-69.

PEMBAHASAN MASALAH

4. Budaya Hukum Masyarakat Yang Menggunakan Barang Merek Tiruan Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah “tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum”. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.⁸⁷

Diketahuinya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut.

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.⁸⁸

⁸⁷ Nurul Saragih, Artikel : *Budaya Hukum, Seni Hukum, dan Sistem Hukum*, www.google.com, diunduh tanggal 25 Mei 2015, jam 15.00 wib

⁸⁸ *Ibid*, hlm.1

Tipe budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu:⁸⁹

(1) Budaya parokial (*parochial culture*)

Pada masyarakat parokial (picik), cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang, akan mendapat kutukan. Masyarakat tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Apabila pemimpin bersifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya jika sifat pemimpinnya *altruis* maka warga masyarakatnya mendapatkan perhatian, karena ia menempatkan dirinya sebagai *primus inter pares*, yang utama di antara yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya etnosentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri dan menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain.

(2) Budaya subjek (*subject culture*)

Dalam masyarakat budaya subjek (takluk), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa. Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 2

menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi. Tipe masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini, menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi, apalagi berusaha mengubah sistem hukum, norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya.

(3) Budaya partisipant (*participant culture*)

Pada masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Disini masyarakat sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ia tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik yang susunannya berdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas ke bawah.

Budaya hukum, sebagaimana diuraikan, hanya merupakan sebagian dari sikap dan perilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam masyarakat setempat. Masih ada faktor-faktor lain yang juga tidak kecil pengaruhnya terhadap budaya hukum seperti system dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup

dan cara kehidupan, disamping sifat watak pribadi seseorang yang kesemuanya saling bertautan.⁹⁰

Budaya hukum saat ini menjadi penting untuk diungkap dalam membahas suatu sistem hukum, mengingat memasuki era global pada akhir abad ke 20 telah terjadi tukar menukar budaya baik lokal maupun universal, zaman pinjam meminjam institusi hukum dan kitab undang-undang atau zaman penyebaran undang-undang secara besar-besaran.⁹¹ Di bidang hak milik intelektual termasuk merek dalam mewujudkan kerjasama membina keseragaman landasan hukum tentang merek yang merupakan harmonisasi hukum diantara bangsa-bangsa di dunia, telah menyebabkan masuknya hukum dan budaya lain ke dalam hukum suatu Negara.

Demikian pula di Indonesia dengan diakomodirnya ketentuan-ketentuan hukum merek yang berasal dari konvensi-konvensi internasional ke dalam undang-undang merek Indonesia, tentu saja akan membawa konsekuensi masuknya budaya lain ke dalam hukum nasional. Ketentuan-ketentuan merek internasional yang dalam sejarahnya berasal dari Negara maju khususnya negara-negara barat tentu mempunyai budaya hukum yang berbeda dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang lebih menunjang nilai-nilai ketimuran.

Undang-undang merek baru yang berorientasi pada hukum yang berasal dari budaya barat, lebih menonjolkan nilai-nilai individual. Nilai-nilai individual tersebut tercermin dalam hak eksklusif yang diberikan undang-undang terhadap pemilik merek terdaftar. Melalui hak eksklusif pemilik merek berhak memonopoli penggunaan merek miliknya dan sekaligus melarang setiap orang atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama tanpa hak.

⁹⁰ Ibid, hlm. 3

⁹¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori & Praktek, Buku Ketiga* (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), Citra Aditya Bakti, hlm. 411.

Perlindungan terhadap hak merek yang bersifat individualism tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat baik sebagai pemilik dan pemegang hak atas merek apabila merek itu dilisensikan maupun konsumen sebagai pengguna barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Sebaliknya didalam masyarakat Indonesia dengan budaya timur, kehidupan sosialnya berputar pada sumbu nilai-nilai kolektif dan komunal. Dengan nilai-nilai komunal itu, rasa kekeluargaan dan kebersamaan lebih diutamakan, sehingga hal-hal yang menonjolkan nilai-nilai individualism masih belum dapat diterima sepenuhnya.

Dilandaskan dengan nilai-nilai komunal tersebut masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan meniru karya orang lain tersebut meniru merek masih merupakan hal yang biasa, dan dalam batas-batas tertentu masih dapat diterima masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang merasa bangga kalau hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika dalam suatu daerah tertentu terdapat beberapa orang yang membuat barang yang sama dengan menggunakan merek yang sama pula.

Definisi dari barang tiruan menurut Pasal 51 Perjanjian TRIPS, didefinisikan sebagai berikut:⁹² “Barang-barang bermerek tiruan adalah barang-barang, termasuk kemasannya, yang identik dengan merek yang terdaftar secara sah yang berkenaan dengan barang tersebut, atau merek tersebut tidak dapat dibedakan aspek-aspek utamanya maka hal tersebut dianggap melanggar hak pemilik merek menurut undang-undang”. Fungsi utama dari merek dagang adalah untuk membedakan dengan barang atau jasa yaitu untuk bertindak sebagai pembeda ‘*badge origin*’. Dengan memenuhi fungsi ini, merek dagang memiliki dua tujuan utama, pertama melindungi niat baik dan reputasi pedagang yang telah

⁹² JICA, *Capacity Building Program on the Implementasi of the WTO Agreements in Indonesia*, Kerjasama Ditjen HKI Departemen Hukum dan Hak Azasi manusia dengan Japan International Cooperation Agency, Jakarta, 2004, hlm. 89

mendaftarkan mereknya dan, kedua, mencegah masyarakat dari tertipu mengenai asal barang atau jasa (*the origin of goods or services*).⁹³

Merek dagang yang telah memiliki nama besar dan terkenal sering kali menjadi objek pelanggaran Hak Kelayaan Intelektual diantaranya dengan dilakukan pemalsuan atas merek-merek terkenal tersebut. Penyebab mengapa bisnis pemalsuan meningkat antara lain :⁹⁴

- (i) Banyaknya keuntungan yang diperoleh, keuntungan lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan jumlah investasi dan biaya yang diperlukan untuk aktivitas pemalsuan. Misalnya para pemalsu tidak harus menanggung besarnya biaya riset, iklan, tuntutan pendaftar HKI atau untuk mendapatkan lisensi, dan untuk mendapatkan hak merek. Selain itu pemalsu tidak perlu menanggung biaya pemakaian mesin-mesin yang berkualitas tinggi misalnya untuk memproduksi barang dan tidak perlu membayar pajak dan biaya asuransi;
- (ii) Walaupun kegiatan pemalsuan sudah dikecam, para pemalsu masih bisa dengan mudah untuk menutupi kerugian maupun denda yang dibebankan oleh pengadilan;
- (iii) Karena tingkat teknologi yang sudah maju, barang-barang tiruan dan bajakan yang berkualitas tinggi dapat dengan mudah diproduksi oleh para pemalsu;
- (iv) Sindikat atau kelompok kejahatan berkemungkinan untuk menjadi pendukung distribusi barang-barang tiruan atau pendukung finansial, Khusus untuk barang-barang dengan merek terkenal;

⁹³ Lisa P. Ramsey, *Free Speech and International Obligations to Protect Trademarks*, The Yale Journal of International Law, Volume 35, Number 1, Winter 2010, hlm.416

⁹⁴ "Trademark Management in Enterprises" Asia Pacific Industrial Property Center, Jape Institute of Invention and Innovation (JIPI) 2009

(v) Tidak efektifnya tindakan penegakan hukum di sebuah negara, sementara itu, barang-barang tiruan dari bajakan mungkin berpusat dan beredar di negara tersebut

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu: (a) pembajakan merk; (b) pemalsuan merek dan (c) peniruan label dan kemasan suatu produk. Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar.⁹⁵ Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditemplei dengan merek terkenal.

Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, Polo, dan Ralph Laurent. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya, namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.⁹⁶

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal tetapi lebih

⁹⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta, 2010 hlm. 119 (Lihat Dwi Agustine Kurniasih, "Perlindungan Hukum Pemilik Merk Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I", Media HKI. Volume V. Nomor 6 Desember 2008. Penerbit: Ditjen HKI. Jakarta, hlm. 2-3.

⁹⁶ *Ibid*

kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.⁹⁷

Secara luas telah dipahami bahwa pelanggaran dan pembajakan merek memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain yang bersifat merusak dengan terjadinya pelanggaran dan pembajakan merek adalah pengurangan kualitas. Merek dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup dan membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat. Merek memegang peranan sangat penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.

Barang-barang tiruan berbahaya bagi perekonomian nasional dan/atau ekonomi global dan munculnya barang-barang tiruan tersebut juga berbahaya bagi pemilik hak merek dan juga konsumen secara umum, karena menimbulkan kerugian antara lain :⁹⁸

- (i) Kerugian besar terhadap ekonomi global dan beredarnya barang-barang tiruan. Setiap tahun sekitar 3-7 persen dan jumlah total barang-barang yang beredar adalah merupakan barang-barang tiruan dan total kerugian terhadap ekonomi global diperkirakan sebesar 70-80 juta dolar US setiap tahunnya.

Sementara pajak yang dikenakan dengan barang-barang tiruan tersebut tidak

⁹⁷ Ibid, hlm 120

⁹⁸ Imas Rosidawati, *Perlindungan Hak Merek Atas Masuknya Barangbarang Palsu Dan Tiruan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen*, hlm. 345 *Proceedings of the International Conference on Consumerism 2013 (ICC2013)*

dibayarkan kepada pemerintah negara bersangkutan jika barang-barang asli diproduksi dan diedarkan secara legal

(ii) Dampak terhadap pemilik HKI;

Untuk menghambat peredaran barang-barang tiruan di pasaran, para pemilik HKI menanggung beban yang berat atas biaya-biaya resmi, seperti besarnya biaya yang ditanggung dalam rangka melarang produksi, peredaran, ekspor dan impor barang-barang tiruan, yang tidak akan diperlukan jika masalah pemalsuan tidak terjadi.

(iii) Dampak terhadap konsumen; Bagi konsumen, hal tersebut akan sangat beresiko jika barang-barang yang dibeli kualitasnya lebih rendah dari yang diharapkan dan tidak mungkin diperbaiki oleh produser atau untuk rnengganti barang-barang yang rusak dengan yang masih dalam kondisi bagus.

(iv) Dampak terhadap masyarakat; Keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh para pemalsu dapat mengalir ke tempat pencucian uang oleh kelompok-kelompok kejahatan.

(vi) Untuk mencegah peredaran barang-barang tiruan dan bajakan, polisi, jaksa, pengadilan bea cukai dan badan-badan pemerintahan yang berkaitan perlu mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan, untuk mengatasi masalah pemalsuan.

Hukum merek nasional sebagai perwujudan harmonisasi terhadap hukum merek internasional mengandung nilai-nilai budaya barat, oleh karena itu untuk dapat diterima dalam masyarakat Indonesia dengan budaya timur diperlukan adanya penyesuaian. Kehadiran undang-undang merek yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pembajakan, pemalsuan atau peniruan

merek, tidak serta merta menimbulkan respon positif dari konsumen, tetapi dipengaruhi oleh sikap dan pandangan konsumen tentang merek.

Berdasarkan analisis hasil penelitian terhadap beberapa orang konsumen yang ada di Kota Pontianak dapat disimpulkan bahwa sikap dan pandangan (persepsi) masyarakat sebagai konsumen tentang merek dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- a. Tingkat pendidikan
- b. Tingkat ekonomi/ kesejahteraan
- c. Lingkungan sosial
- d. Tingkat pengetahuan konsumen tentang hak-haknya

Sesuai dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan, lingkungan sosial dan pengetahuan konsumen tentang hak-haknya, setiap konsumen mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang merek. Ada konsumen yang memandang merek hanya sebagai tanda untuk membedakan barang yang satu dengan lainnya yang sejenis, dan tidak mempunyai makna tertentu. Tetapi bagi konsumen dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya yang sudah lebih baik, merek dipandang sebagai jaminan kualitas barang atau jasa yang mempunyai makna tertentu yakni sebagai symbol. Melalui merek dapat diketahui bagaimana kualitas suatu barang atau dari mana asal usul suatu barang. Bahkan untuk konsumen tertentu, merek tidak hanya sekedar jaminan kualitas melainkan sudah menjelma menjadi “symbol” yang menimbulkan imajinasi gaya hidup (*life style*).

Bagi konsumen yang memandang merek sebagai jaminan kualitas, asal usul dan symbol untuk menjaga gengsi dan kehormatan, menginginkan adanya penggunaan merek secara jujur oleh produsen dalam perdagangan barang atau jasa. Pelanggaran terhadap hak merek dianggap sangat merugikan konsumen,

karena konsumen dapat tertipu dalam membeli barang atau jasa. Sebaliknya bagi konsumen yang memandang merek hanya sebagai tanda ataupun hanya sebagai gengsi yang bersifat semu, adanya merek palsu atau tiruan justru menguntungkan konsumen, karena keinginan untuk mendapatkan barang-barang dengan merek tertentu terutama merek yang sudah terkenal dari luar negeri akan dapat terpenuhi dengan adanya merek palsu atau tiruan.

Suatu hal yang juga dapat mempengaruhi sikap dan pandangan konsumen terhadap pelanggaran hukum terhadap hak merek adalah, adanya nilai-nilai yang merupakan budaya yang dianut masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran yang lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal) dan tidak terlalu menonjolkan sifat individual. Dengan nilai-nilai komunal ini masih ada sebagian masyarakat memandang peniruan terhadap hasil karya orang lain termasuk peniruan merek sebagai suatu hal yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu pelanggaran hukum.

5. Pengaturan Terhadap Masyarakat Yang Menggunakan Barang Dengan Merek Tiruan

Hak atas kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin menarik untuk di kaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Dalam hubungan ini, era globalisasi dapat ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antarnegara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar kebelahan dunia lainnya. Hal ini membawa

implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan antarbangsa.⁹⁹

Era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendati pun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antar negara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mengacu pada dua hal tersebut, upaya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan pengembangan, dan penguasaan teknologi.¹⁰⁰

Di antara bidang-bidang HKI yang ada pasca hadirnya TRPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), masalah merek merupakan hal yang penting. Inti permasalahan tersebut berhubungan dengan perlindungan terhadap pemegang merek yang sah yang kemudian diakui oleh orang lain secara melawan hukum. Permasalahan hukum merek merupakan hal yang bersifat kompleks, hal ini dapat di lihat dari penjelasan berikut ini: perkembangan yang terjadi dalam hukum merek juga mengharuskan pemerintah untuk selalu memperbarui peraturan yang ada agar dapat mengikuti perkembangan dan zaman. Perkembangan di bidang perdagangan dan investasi telah semakin pesat, sehingga dengan adanya undang-undang merek yang dapat menampung

⁹⁹ Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan 1. Yogyakarta, hlm.5-6

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 1-2

perkembangan yang ada diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemilik merek tetapi juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.¹⁰¹

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.¹⁰²

Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang "**KW**", dalam Pasal 90 – Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur mengenai tindak pidana terkait merek :

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar,

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 4 (lihat Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002:5)

¹⁰² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, I.Umum.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran Dan secara tegas pula, dalam Pasal 95, UU Merek menggolongkan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagai delik aduan, bukan delik biasa. Dalam keilmuan hukum, hal ini berarti bahwa pasal-pasal pidana dalam UU Merek diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain sehingga terkait delik aduan pun penyidikan kepolisian dapat dihentikan hanya dengan adanya penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor sepanjang belum diperiksa di pengadilan.

Tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, hanya dapat ditindak jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari perumusan Pasal 95 UU Merek yang menyatakan bahwa : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik

aduan.” Ini berarti bahwa penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi (Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek).

Dalam menilai sebuah barang merupakan barang palsu atau bukan di mata hukum pun polisi tidak dapat melakukannya secara sepihak. Dalam sistem perlindungan hak merek yang saat ini dianut oleh Indonesia, yakni sistem *First to file*, ‘pelanggaran merek’ hanya terjadi apabila ada tindakan-tindakan penggunaan merek terdaftar oleh pihak-pihak beriktikad buruk yang dilakukan dalam masa perlindungan atas merek yang bersangkutan sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran mereknya. Tidak ada pelanggaran tanpa pendaftaran merek karena dalam sistem *First to file*, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik pendaftaran merek. Pelapor harus mampu menunjukkan sertifikat merek atau alas hak lainnya yang sah pada saat melakukan pelaporan atas suatu tindak pidana merek.

Selain harus mampu menunjukkan bukti kepemilikan merek yang sah, si pelapor harus mampu menunjukkan kepada kepolisian perbedaan-perbedaan antara barang asli dan barang palsu secara jelas. Hal ini tentu saja untuk menghindari penegak hukum melakukan kekeliruan dalam menangkap dan memproses pidana para pelaku pelanggaran merek.

Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dalam menerapkan hukum Pasal 481 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Mengacu kepada asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* (aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum), dengan telah diaturnya tindak pidana pemalsuan merek dalam UU Merek (*lex specialis*), menurut pendapat saya Pasal 481 KUHP (*lex generalis*) tidak dapat diterapkan dalam perkara pemalsuan merek, termasuk dalam kasus pembelian tas “KW” oleh konsumen ini. Selain harus membuktikan adanya unsur kesengajaan konsumen dalam membeli dan menyimpan barang (palsu), penegak hukum juga harus membuktikan bahwa barang (palsu) tersebut ‘diperoleh dari kejahatan’.

Kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis ketika melakukan wawancara dengan narasumber dari Kementerian Hukum Dan Ham bidang Kekayaan Intelektual Kalimantan Barat Ibu Devi bahwa pengguna merek-merek palsu tetap tidak dapat diberikan sanksi dikarenakan unsur ‘diperoleh dari kejahatan’ dalam Pasal 481 KUHP tidak dapat diterapkan kepada tas-tas “KW”, yang dianggap diperoleh dari tindakan pemalsuan merek. Selain karena membutuhkan proses hukum tersendiri untuk menetapkan suatu barang merupakan barang palsu atau bukan, juga karena penafsiran menyangkut pemalsuan merek tidak dapat mengesampingkan UU Merek sebagai *lex specialis* dalam perkara merek, yang telah secara tegas mengatur bahwa pemalsuan merek merupakan pelanggaran dan bukan kejahatan (Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 ayat (2) UU Merek).¹⁰³

6. Pengaturan Yang Baik Terkait Dengan Fenomena Penggunaan Barang Merek Tiruan Oleh Masyarakat Guna Menunjang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek

¹⁰³ Hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2013

Merek merupakan hal yang penting dalam dunia industri dan perdagangan. Penggunaan merek dagang dalam pengertian seperti kita kenal dewasa ini mulai berkembang tidak lama setelah dimulainya revolusi industri pada pertengahan abad XVIII, yang digunakan untuk memberi tanda produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (*indication of origin*). Perkembangan sistem perdagangan modern menuntut untuk penyesuaian dalam perlindungan hukum terhadap merek atas produk yang diperdagangkan. Melihat kenyataan tersebut, maka berbicara mengenai merek harus dimulai dengan menganalisis rasionalisasi ekonomi dan justifikasi hukum. Dengan kata lain, mengkaji filosofisnya tentang merek perlu dikedepankan daripada hanya terbatas dari sisi administratifnya seperti pendaftaran merek, pembatalan merek dan sebagainya.

Sungguhpun berbagai peraturan merek telah diterbitkan, pelanggaran merek masih sangat banyak. Kasus peniruan, pembajakan, dan hak milik intelektual lainnya. Dalam perkembangannya, fungsi merek mengarah sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) bagi produsen atau para pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa. Di luar negeri merek seringkali digunakan untuk mempertahankan *goodwill* di mata konsumen, dan merek itu merupakan simbol yang dapat digunakan pihak pedagang untuk memperluas pasarannya diluar negeri, serta mempertahankan pasaran tersebut.

Di Indonesia fungsi merek dipergunakan sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan industri, perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini diakui oleh CAFI (*Commercial Advisory Foundation in Indonesia*), bahwa mengenai paten dan trademark di Indonesia memiliki peranan yang

penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.¹⁰⁴

Prinsip-prinsip penting berkaitan dengan merek juga ditemukan di dalam UU Merek Indonesia. Setidaknya ada 10 prinsip penting yang dapat disimpulkan dari UU Merek tersebut, yaitu :¹⁰⁵

1. Merek adalah sebuah tanda yang membedakan sebuah produk barang atau jasa dengan produk atau jasa yang lain yang sejenisnya. Dalam menentukan tanda tersebut, UU Merek Indonesia hanya berdasar pada unsur-unsur tradisional seperti gambar, nama, kata, huruf, angka dan kombinasi antara unsur-unsur tersebut, sedangkan unsur-unsur baru seperti suara, bau dan bentuk suatu produk belum dimasukkan di dalam UU Merek Indonesia.
2. Perlindungan merek diberikan berdasarkan permohonan. Dengan kata lain, pendaftaran merek merupakan syarat utama perlindungan merek.
3. Pihak yang mengajukan merek tidak hanya dibatasi pada orang (*persoon*) tetapi juga badan hukum (*recht persoon*) maupun beberapa orang atau badan hukum;
4. Tidak seperti cabang-cabang HKI yang lain, jangka waktu perlindungan merek dapat terus diperpanjang asalkan permohonan perpanjangan merek dilakukan dua bulan sebelum jangka waktu tersebut berakhir;
5. Berkaitan dengan pendaftaran merek, UU Merek menyediakan pengecualian khusus terhadap perlindungan indikasi asal yang tidak harus didaftarkan;
6. UU Merek menganut asas pendaftar pertama atau first to file. Melalui asas ini, pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dianggap sebagai pemilik Merek yang sah;

¹⁰⁴ Djumhana, Muhammad, Djubaidillah, 1997, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia, Bandung*, hlm 160

¹⁰⁵ Ronna Novy Yosia Taliwongso, Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, hlm . 156

7. UU Merek menggunakan prinsip pemohon merek yang beritikad baik. Prinsip ini mengandung arti bahwa hanya pihak yang berhak terhadap merek yang dapat mengajukan permohonan merek;
8. Penghapusan Merek direktorat jenderal terjadi karena sempat kemungkinan yaitu: a) atas prakarsa DJHKI; b) atas permohonan dari pemegang merek; c) putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan merek dan d) tidak diperpanjangnya jangka waktu pendaftaran merek;
9. Untuk mempercepat penyelesaian perkara merek, putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi;
10. UU Merek menyandarkan proses tuntutan pidana berdasarkan prinsip delik aduan. Melalui prinsip ini, pihak pemilik merek yang dirugikan harus melaporkan terlebih dahulu pelanggaran yang telah dilakukan pihak lain sebelum tuntutan tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik.¹⁰⁶

Dalam mengembangkan dan memperkuat sistem HKI nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memerlukan koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak-pihak terkait termasuk institusi pemerintah lainnya, universitas, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, LSM dan sektor-sektor swasta. Sistem hukum yang kuat akan mendukung proses penegakan hukum, termasuk penegakan hukum bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti merek.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari **sudut subjeknya**,¹⁰⁷

¹⁰⁶ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010, hlm. 206-207

¹⁰⁷ Jimly Asshiddiqie, Artikel : *Penegakan Hukum*, PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: <http://www.docudesk.com>, hlm. 1

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari **sudut objeknya**,¹⁰⁸ yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti

¹⁰⁸ Ibid, hlm 2

'the rule of man by law'. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Penegakan hukum dapat terlaksana jika sistem hukum juga berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman¹⁰⁹, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum

¹⁰⁹ Ahmad Muliadi, 2013, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang, hlm. 100

(*legal substance* mengenai norma, peraturan maupun undang-undang) dan budaya hukum (*legal culture*). Begitu pula dengan pengaturan perundang-undangan bagi perlindungan hak merek yang sering dilanggar apalagi dalam dunia bisnis. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan yang mengatur tentang hak merek memerlukan pertimbangan sebagai mana yang disebutkan oleh Lawrence Friedman yaitu : substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

1. Substansi Hukum

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa terdapat berbagai aturan yang mengatur tentang perlindungan hak merek, mulai dari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional serta peraturan-peraturan antara lain peraturan presiden dan menteri terkait dengan perlindungan merek, selama ini secara substansi kesemua peraturan tersebut belum memberikan gambaran tentang aturan yang jelas dan mampu menciptakan keamanan bagi pemilik merek untuk menjaga merek yang mereka miliki.

Secara substansi pengaturan perlindungan merek yang ada selama ini belum memberikan suatu perlindungan yang pasti bagi para pemegang merek, hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran bidang merek diantaranya adalah pemalsuan merek. Peraturan-peraturan yang ada belum memberikan kepastian terhadap pengguna merek palsu sehingga perdagangan barang yang menggunakan merek palsu tetap marak di pasar-pasar atau pusat perdagangan. Substansi hukum disini berlaku prinsip bahwa hukum berlaku umum untuk semua orang dan berlaku yang sama (*equality before the law*).

2. Struktur Hukum

Struktur hukum berkenaan dengan kelembagaan yang berwenang dalam memberikan perlindungan pemilik merek resmi dari penyalahgunaan pihak-pihak

yang tidak bertanggung jawab. Para penegak hukum itu secara struktur harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemilik merek resmi. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik selalunya diawali oleh perancangan hukum yang baik pula, demikian pula kelembagaan aparat penegak hukum dewasa ini juga masih menjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Indonesia.

Kinerja aparat berwenang dalam memberikan perlindungan masih belum memberikan kepuasan bagi pemilik merek, diakui masih perlu perbaikan kinerja yang menunjukkan kesungguhan dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan. Pengawasan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh tiap-tiap institusi/kelembagaan belum dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap hasil kinerja yang dilakukan karena masih terkendala dengan peraturan yang belum memadai untuk memberikan sanksi bagi pengguna merek-merek palsu. Hal ini yang mengakibatkan tetap marak penggunaan merek-merek palsu yang diproduksi oleh pengusaha oleh masyarakat karena merasa apa yang mereka lakukan bukan merupakan suatu kesalahan.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat maupun birokrat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum. Seringnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik masyarakat selaku pengusaha maupun masyarakat selaku

konsumen, menjadi penyebab tidak berfungsinya pengaturan perlindungan hak merek selama ini. Masyarakat dan penegak hukum sebagai elemen dari suatu sistem hukum sebaiknya menjadi pendorong upaya penegakan hukum bukan sebaliknya. Jika penegakan hukum yang ada terkendala masalah peraturan maka adalah tepat jika dilaksanakan suatu pembangunan hukum.

Pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat, menjadi suatu hal yang penting agar kegiatan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibentuk dengan dilandasi tiga hal, yaitu :

1. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
2. Politik hukum peraturan perundang-undangan nasional yang baik;
3. Sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang memadai.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang disebut dengan peraturan perundang-undangan bentuknya pasti tertulis dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai peraturan tertulis berupa legislasi dan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat kongkrit dan khusus.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk

peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, dan;
- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan bersifat terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bidang kekayaan intelektual pada Dirjen Kekayaan Intelektual di Kalimantan Barat diperoleh pendapat bahwa : selama ini kendala perlindungan terhadap merek selain persoalan para pelaku usaha yang sering tanpa merasa salah menggunakan merek orang lain dengan sengaja, persoalan lain adalah tetap marak pengguna merek-merek palsu tersebut oleh masyarakat, sedangkan terhadap pengguna sampai saat ini belum ada sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka, kita tinggal menunggu kesadaran hukum masyarakat saja.¹¹⁰

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Kabit KI Diejen KI Kalimantan Barat tanggal 5 Mei 2015

Kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum antara *das sein* dengan *das sollen* dalam fakta adalah sama. Secara *a contra-ratio* jika didalam masyarakat banyak kita dapatkan bahwa masyarakat tidak patuh pada hukum hal ini dikarenakan individu dan masyarakat dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan dimana antara tuntutan kesetiaan yang satu bertentangan dengan tuntutan kesetiaan lainnya.

Misalnya masyarakat tersebut dihadapkan pada pilihan setia terhadap hukum atau setia terhadap kepentingan pribadinya, setia dan patuh pada atasan yang memerintahkan berperang dan membunuh atau setia kepada hati nuraninya yang mengatakan bahwa membunuh itu tidak baik, atau yang lebih umum seperti yang sering terjadi masyarakat tidak patuh pada aturan lalu-lintas, perbuatan korupsi, perbuatan anarkisme dan main hakim sendiri (*eigen rechting*) karena mereka lebih mendahulukan setia kepada kepentingan pribadinya atau kelompoknya.

Apalagi masyarakat sekarang ini menjadi lebih berani tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum karena kepentingan pribadinya pula tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif . Sehingga dalam hal ini, kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa manusia atau masyarakat kita tidak patuh pada hukum.

Penggunaan merek palsu oleh masyarakat menandakan masyarakat juga belum sepenuhnya patuh akan hukum, hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai alasan mereka melakukan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara secara tertutup dengan konsumen atau pengguna barang bermerek palsu dapat diketahui bahwa penggunaan merek palsu yang mereka lakukan karena mengikuti trend mode, harga yang lebih murah dibanding dengan merek aslinya, serta yang terpenting menurut mereka tidak ada aturan yang melarang mereka menggunakan merek palsu tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu kiranya pemerintah selaku pengambil kebijakn untuk berpikir melakukan perbaikan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada agar perlindungan terhadap merek-merek resmi dapat dilaksanakan dengan baik.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa budaya hukum masyarakat yang menggunakan merek-merek palsu yang diproduksi oleh pelaku usaha selama ini telah menjadi suatu trend, namun kenyataan menunjukkan budaya tersebut sangat bertentangan dengan budaya hukum yang baik, sebab budaya hukum yang baik meliputi sikap, nilai dan prilaku masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak pernah mengatur atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang menggunakan produk-produk hasil dari pemalsuan merek-merek terkenal, hal ini menyebabkan budaya hukum masyarakat menjadi tidak baik karena tidak adanya aturan yang tegas, dianggap oleh masyarakat perbuatan menggunakan merek-merek palsu bukanlah suatu kesalahan
3. Bahwa pengaturan berkaitan dengan merek tidak saja diatur dalam Undang-Undang Nasional Indonesia melainkan juga diatur dalam suatu aturan Internasional, hal ini menunjukkan betapa berharganya sebuah kekayaan intelektual untuk dihargai dan dilindungi, namun pengaturan yang ada selama ini belum memberikan perlindungan secara maksimal karena tidak terdapat aturan tentang sanksi bagi pengguna merek-merek palsu, sehingga dimungkinkan perbaikan terhadap peraturan yang telah ada selama ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia perlu diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Tidak saja terhadap pelaku tetapi juga kalangan pengguna sehingga akan menimbulkan efek jera kepada masyarakat.
2. Bahwa masyarakat perlu diberikan penyuluhan, pemahaman dan pendidikan hukum yang baik untuk lebih menghargai merek-merek yang telah memiliki perlindungan hukum.
3. Bahwa pemerintah perlu meninjau ulang peraturan tentang merek dengan memasukkan sanksi hukum yang tegas terhadap para pengguna merek-merek palsu. Dengan adanya undang-undang yang tegas kita mewujudkan perlindungan terhadap pemilik hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Edisi Pertama, Bandung.
- Bintang Sanusi dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1. Bandung
- Bagus, Lorens 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Cita Citrawinda Priapantja, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Davies Colin & Tania Cheng, 2011, *Intellectual Property Law in the United Kingdom*, Kluwer International BV, Netherlands.
- Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama, Bandung
- Hariyani Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta
- Marbun Rocky, dkk., 2012, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta
- Firmansyah Hery, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan 1. Yogyakarta
- Gautama Sudargo, 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay (1994)*. PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan 1. Bandung
- Margono Suyud, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. CV. Nuansa Aulia. Cet. 1. Bandung
- Nurachmad Much, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta

- Purwaningsih Endang, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syamsudin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta
- Syamsuddin M.S., 2004, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Supramono Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Utomo Suryo Tomi, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta.
- Zein, Ahmad, Yahya, 2012, *Problematisasi Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Negara RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Artikel Dan Jurnal

- Ade Maman Suherman, *Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia*, Jurnal Hukum Bisnis , Jakarta, Volume 23 Tahun 2004
- D. Shyamala, *Domain name- Trademark conflict Resolution : An Evaluation of UDRP (The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)*, Australian Intellectual Property journal, Volume 21 / 1, march 2010
- Imas Rosidawati Wt, *Perlindungan Hak Merek Atas Masuknya Barangbarang Palsu Dan Tiruan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen, Proceedings of the International Conference on Consumerism 2013 (ICC2013)*

Ramsey Lisa P., *Free Speech and International Obligations to Protect Trademarks*, The yale Journal of International Law, Volume 35, Number 1, Winter 2010